

ANALISIS PERDAGANGAN BERAS DAN KETAHANAN PANGAN DI NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA

Iwan Hermawan*

Abstract

Rice trade has function to maintain sufficient rice stock for fulfill domestic demand. Some of main rice exporter and importer countries in world market are in Southeast Asia region, so changing in traded rice quantities will influence trade flow. Rice as strategies commodities and so many countries have intervented in domestic rice market to achieve food security and political security. The aim of this paper is analysis of development of rice trade in southeast asia countries related with food security. Anlysis desciptive approached is applied to answer that aim. The result showed that in 2005-2012, growth rate of rice impor in Southeast Asia countries is 14,08percent and dan rice consumption share is more than 22 percent to world rice consumption. Growth rate of its rice export is 2,21percent and supporting paddy production share is more than 30 percent to paddy production in the world. Government has intervented rice market through international trade, such as rice export ban and license scheme, and domestic rice price stabilization policy to maintain rice stock refer to food security. Economic integration through ASEAN Economy Comunnity will be a important moment as a base to achieve food security and making rice market more opened intra-Southeast Asia countries.

Keywords: *Rice, international trade, policy, Southeast Asia*

Abstrak

Perdagangan beras berfungsi untuk menjaga stok beras yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan domestik negara. Pengekspor dan pengimpor beras utama dunia di antaranya berada di wilayah Asia Tenggara, sehingga perubahan jumlah beras yang diperdagangkan dapat mempengaruhi aliran perdagangan tersebut. Mengingat beras sebagai komoditas yang sangat strategis maka banyak negara mengintervensi pasar beras domestiknya guna mewujudkan ketahanan pangan dan bahkan bagi kepentingan keamanan politik negaranya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan perdagangan beras di wilayah Asia Tenggara terkait dengan ketahanan pangan. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2012, laju pertumbuhan impor beras negara-negara Asia Tenggara mencapai 14,08 persen dan dengan kontribusi konsumsi beras mencapai lebih dari 22 persen terhadap konsumsi beras dunia. Sedangkan laju pertumbuhan ekspor berasnya mencapai 2,21 persen dan dengan produksi padi lebih dari 30 persen terhadap produksi padi dunia. Pada umumnya negara-negara Asia Tenggara mengintervensi pasar beras melalui kebijakan perdagangan internasional, baik berupa larangan ekspor

* Peneliti Bidang Ekonomi Terapan, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, alamat email: iwan.hermawan@dpr.go.id.

maupun lisensi, dan kebijakan stabilisasi harga beras domestik, untuk menjaga stok beras guna menguatkan tingkat ketahanan pangan. Integrasi ekonomi Asia Tenggara melalui ASEAN Economy Community menjadi momen penting untuk menjadi landasan dalam mewujudkan ketahanan pangan pada level regional dan sekaligus menjadikan pasar beras lebih terbuka antarnegara-negara Asia Tenggara.

Kata kunci: Beras, perdagangan, Asia Tenggara, kebijakan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian di wilayah Asia Tenggara secara umum memiliki dampak ekonomi dan sosial yang penting. Kehidupan masyarakat di wilayah Asia Tenggara lebih kurang 45 persen dari 524 juta penduduk masih tergantung pada sektor pertanian.¹ Salah satu peran esensialnya adalah berkaitan dengan penyediaan pangan, pakan, dan bahan bakar. Ketersediaan pangan yang cukup dan stabil dapat memberikan sumbangan bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara.² Menurut Norman Borlaug, bapak revolusi hijau pemenang hadiah Nobel tahun 1970, bahwa kecukupan pangan merupakan syarat pertama untuk hidup. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila sektor tersebut dijadikan prioritas dalam *blueprint Association of Southeast Asian Nations Economy Community (AEC)*.³

Salah satu pangan yang menjadi bahan pangan pokok utama dan strategis di dunia adalah beras, baik di negara berkembang dan negara maju. Di mana beras dikonsumsi oleh setengah dari tujuh miliar penduduk di dunia, lebih dari 90 persennya dikonsumsi oleh penduduk di Asia serta lebih dari 22 persennya dikonsumsi oleh penduduk di Asia Tenggara.⁴ Selain itu beras juga berperan penting terkait dengan kebutuhan gizi masyarakat. Bahkan bahkan bagi sebagian masyarakat beras juga menjadi komponen sentral dalam budaya sejumlah

¹ Menurut Normaz Wana Ismail, Peter Smith, and Maurice Kugler, "The Effect of ASEAN Economic Integration on Foreign Direct Investment", *Journal of Economic Integration*, Vol. 24, No. 3 (September 2009), h. 402-404, bahwa integrasi ekonomi regional dapat menjadi media untuk menarik lebih banyak FDI dan biasanya dibarengi dengan penawaran paket kebijakan investasi yang lebih atraktif dan dapat mendorong daya saing.

² Iwan Hermawan, *Peran Sektor Pertanian untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia dalam Turbulensi Ekonomi*, Edisi Bunga Rampai "Agenda Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Program Legislasi Bidang Ekonomi", (Jakarta: P3DI, 2011), h. 31.

³ "Supporting the ASEAN Economic Community (AEC)-Agriculture", (<http://www.aadcp2.org/home/stream.php?id=6>, diakses 17 Juli 2013).

⁴ Samarendu Mohanty, "Trends in Global Rice Consumption", (http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12448:trends-in-global-rice-consumption&lang=en, diakses 16 Agustus 2013) dan data FAO tahun 2013.

komunitas. Di sisi lain lebih dari 200 juta petani memproduksi padi dengan skala usaha kurang dari satu hektar dan budidayanya menjadi aktivitas ekonomi utama yang melibatkan banyak kelompok masyarakat miskin.⁵ Beras juga berperan sebagai “standar” upah pekerja pada sektor pertanian tanaman pangan ataupun nonpertanian. Peran dualitas ini sering memunculkan konflik dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, apakah akan mengintervensi dengan melindungi petani ketika harga turun atau melindungi konsumen ketika harga naik.⁶

Kebijakan menjaga stok beras yang cukup berkontribusi besar untuk menjaga ketahanan pangan, salah satunya dapat dilakukan melalui perdagangan. Pertumbuhan jumlah penduduk dan pergeseran pusat ekonomi global ke wilayah Asia, khususnya dengan munculnya *emergence countries* seperti Cina dan India, telah meningkatkan perdagangan negara-negara Asia Tenggara sebagai bagian dari jaringan produksi dan *supply chain*.⁷ Setiap negara-negara di Asia Tenggara mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan beras penduduknya dengan produksi padi, namun tidak semua negara didukung oleh sumber daya alam dan agroklimat. Kondisi ini menjadikan negara-negara di Asia Tenggara selain sebagai eksportir beras terbesar di dunia juga sebagai negara pengimpor terbesar kedua di dunia.⁸ Thailand dan Vietnam menjadi negara-negara pengekspor utama beras di wilayah Asia Tenggara, sedangkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai negara-negara pengimpor utama beras di wilayah Asia Tenggara.

Perdagangan beras Asia Tenggara berkontribusi besar terhadap pertumbuhan perdagangan beras di pasar beras dunia. Menurut data UN *Comtrade*, pada tahun 2005 hingga tahun 2012, laju pertumbuhan impor beras Asia Tenggara mencapai 14,08 persen. Sedangkan menurut prediksi *Food and Agriculture Organization* (FAO), bahwa pada tahun 2013 Indonesia akan menjadi salah satu negara yang menstimulasi kontraksi total impor beras di pasar dunia. Di sisi lain kontribusi konsumsi beras di wilayah Asia Tenggara rata-rata lebih dari 22 persen terhadap konsumsi beras di dunia.⁹ Sedangkan

⁵ “Rice Basics”, (http://www.irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=9081&lang=en, diakses 27 September 2013).

⁶ Concepción Calpe, *Rice International Commodity Profile*, (Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2006), h. 2.

⁷ Masahiro Kawai and Ganeshan Wignaraja, “Regionalism as an Engine of Multilateralism: A Case for a Single East Asian FTA”, Working Paper Series on Regional Economic Integration No. 14, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2008, h. 3.

⁸ Katherine Baldwin, Nathan Childs, John Dyck, and Jim Hansen, “Southeast Asia’s Rice Surplus”, A Report from the Economic Research Service, United States Department of Agriculture, 2012, h. 24.

⁹ Samarendu Mohanty, *Op.Cit.*

apabila dilihat dari sisi ekspor, berdasarkan data FAO bahwa kontribusi ekspor beras negara-negara di Asia Tenggara ke pasar beras dunia mencapai lebih dari 50 persen. Besarnya ekspor tersebut didukung oleh kontribusi produksi padi yang mencapai lebih dari 30 persen terhadap produksi padi di dunia pada tahun 2012.

B. Permasalahan

Dilematis antara memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri dengan memenuhi permintaan beras di pasar dunia sering dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara. Pemenuhan permintaan beras di pasar dunia membantu negara memperbaiki pendapatannya. Namun ketergantungan terhadap permintaan eksternal yang tinggi membuat negara lebih rentan terhadap fluktuasi permintaan global dan guncangan eksternal. Permintaan di dalam negeri menjadi perhatian penting dalam pertumbuhan jangka menengah dibandingkan memenuhi permintaan luar negeri. Total jumlah penduduk yang besar dan peningkatan jumlah penduduk kelas menengah akan merubah permintaan di dalam negeri terhadap barang dan jasa.¹⁰ Kondisi tersebut membuat beras diperdagangkan dalam jumlah yang tipis, yaitu sekitar 25 juta ton atau sekitar 7 persen dari produksi global. Oleh sebab itu negara pengekspor dan pengimpor beras melihat pasar beras di dunia dengan sangat hati-hati jika terjadi kelangkaan beras dan secara simultan berusaha menjaga konsumsi domestiknya agar tetap stabil sehingga dapat tercapai ketahanan pangan.¹¹ Misalnya Pemerintah Vietnam berulang kali melakukan hambatan ekspor untuk mengatasi kekurangan beras di pasar domestiknya. Pemerintah Thailand melakukan pembelian beras dalam jumlah besar meskipun dengan harga tinggi guna menghalangi ekspornya.

Konsekuensi logis implementasi AEC pada tahun 2015 adalah akselerasi tingkat persaingan yang semakin terbuka pada perdagangan beras di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Bagi negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan faktor *endowment* yang berlimpah maka peningkatan produktivitas dan perluasan pasar beras menjadi elemen yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Namun bagi negara-negara di kawasan semenanjung Asia Tenggara (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam), jika pasar domestiknya dibuka terlalu cepat maka petani padi

¹⁰ OECD and ASEAN Secretary, *Southeast Asian Economic Outlook 2013, With Perspectives On China And India, Narrowing Development Gaps*, (Paris and Jakarta: OECD and ASEAN Secretary, 2003), h. 2 and 8.

¹¹ C. Peter Timmer, "Causes of High Food Prices", ADB Economics Working Paper Series No. 128, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2008, h. 15.

akan berhadapan langsung dengan petani dari negara-negara Asia Tenggara lainnya yang lebih matang. Hal ini akan mempengaruhi perluasan ekspor dan pendapatan dari tarif.¹²

Perdagangan beras yang tipis dan ekskalasi persaingan pasar melalui pembentukan pasar tunggal di ASEAN pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan untuk mempertahankan ketahanan pangan jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan karakteristik dari produksi padi yang didominasi oleh petani berskala usaha kecil namun menjadi komoditas pangan yang dibutuhkan oleh banyak orang.¹³ Sedangkan di sisi lain perubahan preferensi konsumen akibat perubahan pendapatan kelas menengah direspon untuk mengantisipasi perkembangan permintaan beras dan substitusi komoditas lainnya seperti ubi kayu dan jagung.¹⁴ Selain itu volatilitas harga beras juga menjadi sinyal bagi produsen untuk masuk pasar dan mempengaruhi daya beli konsumen. Produksi, konsumsi, dan harga beras, baik di dalam dan luar negeri, menjadi faktor-faktor esensial yang perlu mendapat perhatian bagi pembuat kebijakan perberasan dan sekaligus ketahanan pangan.

Perkembangan perdagangan beras di wilayah Asia Tenggara, baik perannya di pasar beras dunia maupun intra perdagangan Asia Tenggara, perlu dielaborasi untuk mendapatkan gambaran tentang dinamika ekspor, impor beras, serta kebijakan yang menyertainya, khususnya terkait dengan ketahanan pangan. Hal ini karena perdagangan beras menjadi salah satu komponen ketahanan pangan dari sisi ketersediaan pangan. Meskipun wilayah Asia Tenggara sebagai wilayah eksportir dan importir beras utama di dunia, namun suatu negara tidak dapat bertindak sendiri sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi global tanpa dukungan wilayah-wilayah lainnya. Oleh sebab itu tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan beras di wilayah Asia Tenggara dan kaitannya dengan ketahanan pangan.

C. Metodologi

Untuk menjawab tujuan penulisan maka digunakan pendekatan analisis deskripsi yang dilengkapi dengan dukungan data-data statistik. Data ekspor, impor, harga, produksi, dan konsumsi beras merupakan data sekunder

¹² David J. Dennis and Zainal Aznam Yusof, "Developing Indicators of ASEAN Integration-A Preliminary Survey for A Roadmap", REPSE Project 02/001, Final Report, ASEAN Secretary and Australian Government, 2003, h. 4.

¹³ Timmer, 2009 dalam Derek D. Headey, "Rethinking the Global Food Crisis, The Role of Trade Shocks", IFPRI Discussion Paper 00958, Washington DC., International Food Policy Research Institute, 2010, h. 7.

¹⁴ International Rice Research Institute, *Rice in the Global Economy Strategic Research and Policy Issues for Food Security*, (Metro Manila: International Rice Research Institute , 2010), h. 3.

dan bersumber dari *trade-map online*, Badan Pusat Statistik (BPS), *Asian Development Bank (ADB)*, *Food and Agriculture Statistic (FAOstat)*, *International Rice Research Institute (IRRI)*, *United State Departement of Agriculture (USDA)*, dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Analisis data dimulai pada rentang tahun 2005-2012, di mana pada periode tersebut terdapat volatilitas harga biji-bijian di pasar dunia, termasuk beras, yang direspon dengan berbagai macam kebijakan perdagangan beras. Penentuan beras sebagai komoditas yang dianalisis didasarkan pada dominasinya dalam perdagangan di wilayah Asia Tenggara dan di dunia. Sedangkan negara-negara Asia Tenggara yang masuk dalam analisis meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Timor Leste tidak dimasukkan dalam analisis karena adanya keterbatasan data.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN EMPIRIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menciptakan lapangan kerja tanpa membebani keuangan publik serta bahkan kegiatan ekspornya dapat mengurangi tekanan terhadap *balance of payment*. Selain itu perdagangan internasional memberikan mafaat dari sisi suplai dengan peningkatan produktivitas melalui inovasi dan transfer teknologi. Berbagai hasil empiris tentang perlu tidaknya perdagangan internasional bagi suatu negara, hasilnya masih bias kepada ekonomi yang lebih berorientasi keluar (*outward looking*) memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berorientasi ke dalam saja.¹⁵

Berdasarkan model *Heckscher-Ohlin (H-O)* atau disebut juga *theory of factor endowment*, yang menggunakan asumsi dua faktor input antara dua negara, dan dua barang, menjelaskan jika suatu negara akan memproduksi dan mengekspor komoditas yang memiliki faktor produksi yang relatif lebih intensif dan suatu negara akan mengimpor komoditas yang relatif sedikit intensif faktor produksinya. Model H-O merupakan model neoklasik yang relatif lebih mendekati perilaku di dunia nyata. Pada dasarnya perdagangan tersebut terjadi karena adanya manfaat yang diperoleh oleh negara pengekspor dan pengimpor dari adanya spesialisasi sumber daya. Batasan negara ataupun politik suatu negara satu dengan negara lain tidak merubah fundamental dari perdagangan internasional tersebut.¹⁶

¹⁵ Halit Yanikkaya, "Trade Openness and Economic Growth: A Cross-Country Empirical Investigation", *Journal of Development Economics*, 72, 2003, h. 57.

¹⁶ Robert M. Dunn and John H. Mutti, *International Economics*, Sixth Edition, (New York: Routledge, 2004), h. 17 dan 52.

2. Keterkaitan Perdagangan Internasional dan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menunjukkan kondisi di mana semua orang pada waktu kapanpun memiliki akses ekonomi dan fisik terhadap pangan dengan jumlah yang cukup, aman, dan bergizi sesuai kebutuhan dan preferensi untuk hidup aktif dan sehat. Keterkaitan antara perdagangan internasional dengan ketahanan pangan lebih lanjut dijelaskan dalam Deklarasi Roma tentang *World Food Security* dan *World Food Summit Plan of Action*. Deklarasi tersebut memberikan landasan ketahanan pangan pada *level* individu, rumah tangga, negara, regional, dan global. Tujuan *World Food Summit* adalah mengurangi jumlah orang yang kekurangan gizi menjadi setengahnya pada tahun 2015 dibandingkan antara tahun 1990 dan tahun 1992. Sedangkan *Millennium Development Goal* nomor satu bertujuan mengurangi proporsi yang menderita kelaparan antara tahun 1990 dan tahun 2015. Salah satu caranya dengan menyediakan pangan yang cukup dalam jumlah dan kualitas melalui produksi di dalam negeri, impor, dan bantuan pangan.

Setiap negara seharusnya dapat mengadopsi strategi yang konsisten dengan sumber daya dan kapasitasnya untuk mencapai tujuan tersebut dan pada waktu yang bersamaan bekerja sama secara regional dan internasional untuk mendapatkan solusi tentang ketahanan pangan. Peningkatan produksi, termasuk yang melibatkan produksi tanaman pangan secara tradisional, secara efisien dikombinasikan dengan impor, cadangan, dan perdagangan pangan internasional maka dapat memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi disparitas regional. Bantuan pangan dan investasi berupa penelitian genetika juga menjadi salah satu dari banyak instrumen yang dapat mendorong ketahanan pangan tersebut.¹⁷

Bagi negara yang mengadopsi pemikiran *food self-reliance* dan bukan *food self-sufficiency* pada umumnya lebih fokus untuk memenuhi ketersediaan pangannya dengan lebih beragam. Oleh sebab itu keberadaan perdagangan internasional menjadi komponen penting sebagai salah satu strategi ketahanan pangan. Negara-negara tersebut memiliki kecenderungan menggunakan globalisasi untuk memperluas pasar dan memproduksi komoditas pertanian yang berorientasi ekspor. Perspektif lain tentang kapitalisme dari negara-negara kaya terhadap negara-negara miskin dapat dieliminasi melalui upaya-upaya dari negara yang belum berkembang tersebut untuk membangun kapasitas negara secara maksimal dan sekaligus membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara lain. *Food self-sufficiency* dapat menjadi

¹⁷ Food and Agriculture Organization, "World Food Summit 13-17 November 1996", Rome-World Food Summit Plan of Action, FAO Corporate Document Repository, (<http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.HTM>, diakses 1 Oktober 2013).

langkah nyata dalam membangun kapasitas negara sehingga mengurangi kerentanan terhadap pengaruh yang merugikan kepentingan domestiknya.¹⁸

Menurut *Asian Development Bank* (ADB), perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Pengaruh tersebut yaitu (1) memperluas pasar karena perdagangan internasional dapat membuka akses yang lebih luas terhadap tambahan sumber produksi dan konsumsi domestik. Bahkan impor dapat membantu menurunkan harga pangan bagi kelompok yang kelaparan atau bergizi buruk dan membantu ketersediaan pangan pada masa paceklik atau bencana alam. Selain itu akses terhadap pasar dapat meningkatkan pendapatan petani melalui penjualan ekspor dan menyediakan akses terhadap input produksi, (2) mempengaruhi harga dan respon sinyal yang ditransmisikan. Perbedaan harga antarpasar dan biaya transaksi menjadi sinyal *trader* untuk memindahkan barang-barangnya dari pasar yang berharga rendah ke pasar dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini mempengaruhi integrasi pasar dan sekaligus mencerminkan bagaimana perubahan harga di satu pasar menentukan aliran barang antarpasar, (3) integrasi pasar berimplikasi tidak hanya pada kekurangan pangan jangka pendek tetapi juga pertumbuhan produksi dalam jangka panjang. Dampak positif dari perdagangan antara lain peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan. Pasar yang tertutup tidak mendorong pelaku usaha mengadopsi teknologi untuk meningkatkan produksi. Selain itu harga pasar akan menjadi sinyal melakukan diversifikasi produk dan pasar, (4) memperluas kompetisi. Pasar yang lebih terbuka mendorong kompetisi yang melintasi batas-batas negara. Kompetisi yang tinggi dari perluasan pasar akan mengurangi *rent-seeking* dan praktik monopoli, (5) secara tidak langsung mempengaruhi ketahanan pangan melalui dampak dari efektivitas instrumen kebijakan ekonomi makro. Instrumen kebijakan fiskal dan moneter akan memberikan insentif atau disinsentif di tingkat mikro. Di banyak negara, pangan memiliki kontribusi yang besar terhadap indeks harga konsumen sehingga impor pangan dapat menurunkan ekspektasi inflasi yang lebih rendah. Di sisi lain perdagangan juga berkontribusi terhadap penerimaan pemerintah melalui tarif, (6) pasar yang berjalan baik melalui perdagangan internasional tetap memerlukan hambatan untuk menjaga stok pangan pada musim paceklik atau bencana alam. Oleh sebab itu banyak negara mengintervensi pasar pangannya dengan melakukan swasembada pangan atau menciptakan kondisi surplus tanpa berintegrasi dengan pasar yang defisit, dan (7) peningkatan impor pangan mengurangi produksi pada

¹⁸ George Kent, "Africa's Food Security Under Globalization", *African Journal of Food and Nutritional Sciences*, Vol 2, No. 1, March 2002, h. 25-29.

wilayah yang rawan kerusakan lingkungan. Perdagangan internasional dapat mengurangi degradasi lingkungan dalam jangka pendek dan meningkatkan produksi yang berkelanjutan.¹⁹

B. Tinjauan Empiris

Perdagangan pangan memainkan peran penting dalam ketahanan pangan di banyak negara. Oleh sebab itu negara-negara seharusnya melakukan diversifikasi sumber-sumber impornya untuk mengurangi kerentanan terhadap gangguan suplai domestik. Perjanjian bilateral dengan penyuplai nontradisional, perjanjian perdagangan regional, sistem cadangan, infrastuktur, dan institusi mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk melakukan diversifikasi dasar dari suplainya. Sedangkan bantuan dalam perdagangan, peningkatan fasilitas perdagangan, dan pembiayaan perdagangan yang lebih baik dan sistem lindung nilai tukar juga dapat memberikan kontribusi penting terhadap komunitas internasional terkait ketahanan pangan.²⁰

Menurut Christopher Stevens, Romilly Greenhill, Jane Kennan, and Stephen Devereux bahwa liberalisasi pertanian terkait ketahanan pangan dapat dicapai oleh negara-negara berkembang tetapi perlu diikuti upaya-upaya nyata. Negosiasi di tingkat dunia melalui Putaran Uruguay memberi landasan terhadap peran perdagangan internasional pada ketahanan pangan. Selain itu peran kebijakan perdagangan pertanian di *level* nasional berpengaruh terhadap ketahanan pangan di *level* individu, tetapi biasanya tidak langsung. Pemerintah melakukan kebijakan ketahanan pangan dengan mendesain perlindungan terhadap elemen-elemen yang menjadi bagian dari ketahanan pangan secara keseluruhan. Kebijakan tersebut berkaitan dengan (1) produksi pangan (kredit dan subsidi input, investasi), (2) pemasaran (pengembangan pemasaran, stabilitas harga pangan), (3) tenaga kerja (mendorong hasil panen dengan kualitas ekspor, pengembangan industri kecil dan menengah), dan (4) transfer dan jaring pengaman-bantuan langsung (program pemberian pangan).²¹

¹⁹ Douglas Brooks, Benno Ferrarini, and Eugenia Go, "Bilateral Trade and Food Security", ADB Economics Working Paper Series No. 367, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2013, h. 1-4.

²⁰ *Ibid.*, h. 21.

²¹ Christopher Stevens, Romilly Greenhill, Jane Kennan, and Stephen Devereux, "The WTO Agreement on Agriculture and Food Security", (http://ieham.org/html/docs/The_WTO_agreement_on_Agriculture_and_Food_Security.pdf, diakses 2 Oktober 2013), p. 52.

Menurut hasil penelitian Ramon L. Clarete²² bahwa volatilitas harga beras yang ekstrim berpengaruh kecil terhadap negara-negara ASEAN. Hal ini terjadi jika ASEAN menyusun strategi perdagangan internasional yang lebih dalam, menjaga stok beras pada tingkat negara dan regional, dan mengumpulkan dan menginterpretasi informasi dan intelegen pasar. Forum perdagangan beras ASEAN dan program fasilitasi perdagangan beras dengan harmonisasi *grade* beras dan sistem sertifikasi menjadi penting dalam perdagangan beras secara regional di masa mendatang, termasuk mempercepat pengurangan tarif impor beras melalui integrasi beras dalam *Trade in Goods Agreement* (ATIGA).

Fundamental pasar beras ASEAN dan dunia pada tahun 2011 hingga tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan dari produksi dan stoknya, sedangkan harga beras juga menurun signifikan selama tiga tahun terakhir. Perilaku perdagangan beras beberapa negara menunjukkan bahwa ketahanan pangan dapat dilakukan dengan kebijakan swasembada di masing-masing negara. Di mana pendekatannya mengurangi *gap* produksi dengan pengeluaran publik (misalnya subsidi dan dukungan harga) yang justru akan mendistorsi keunggulan kompetitif dalam memproduksi dan melakukan perdagangan produk-produk lain. Ketika negara mencapai swasembada beras dengan biaya yang besar maka ada biaya eksternal yang membuat pasar global lebih tipis dan harga menjadi lebih berfluktuasi, dan kerugian bagi negara produsen yang memiliki keunggulan kompetitif dalam menyuplai beras di pasar dunia. Berdasarkan prediksi di wilayah ASEAN, bahwa dasar faktor bawaan dari negara Kamboja, Laos, dan Myanmar perlu ditopang oleh investasi modal dalam infrastruktur untuk mendukung produksi beras ASEAN yang lebih besar dan stabil.²³

Salah satu negara eksportir beras adalah Vietnam. Setelah pencapaian swasembada beras tahun 1989, Vietnam berubah dari negara importir menjadi negara eksportir terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Hal ini dikarenakan adanya ekspansi areal tanam dan peningkatan hasil panen. Perbaikan irigasi dan drainase, penggunaan pupuk intensif, dan program kuota ekspor beras dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN). Program ekspor beras tersebut membuat harga ekspor beras Vietnam relatif lebih rendah (kualitas beras yang sama) dibandingkan dengan Thailand. Hasil penelitian ini

²² Ramon L. Clarete, "Enhancing ASEAN's Resiliency to Extreme Rice Price Volatility", ADB Sustainable Development Working Paper Series No. 23, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2012, h. 18-19.

²³ Eric J. Wailes and Eddie C. Chavez, "ASEAN and Global Rice Situation and Outlook", ADB Sustainable Development Working Paper Series No. 22, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2012, h. 10.

menyarankan bahwa kebijakan perberasan yang lebih liberal dapat membantu peningkatan produksi dan ekspor beras tersebut.²⁴

Di sisi lain hubungan antara kebijakan perdagangan internasional dengan ketahanan pangan juga bukan hal sederhana untuk dijelaskan. Jika kebijakan domestik dilakukan untuk menyediakan kecukupan pangan dan insentif bagi petani maka halangan perdagangan tidak seharusnya digunakan sebagai instrumen perlindungan. Jika negara kaya mensubsidi ekspor pangannya, kondisi ini menjadi insentif bagi konsumen di negara pengimpor berupa harga yang lebih rendah. Namun impor tetap harus diperhatikan agar kompetisi dengan produsen domestik berjalan lebih adil.²⁵

Berdasarkan beberapa tinjauan empiris tersebut, perdagangan internasional berperan penting terhadap ketahanan pangan suatu negara dalam sisi penyediaan pangan. Liberalisasi perdagangan beras direspon oleh banyak negara-negara dengan mengintervensi pasar domestiknya agar suplai beras domestik lebih terjamin.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

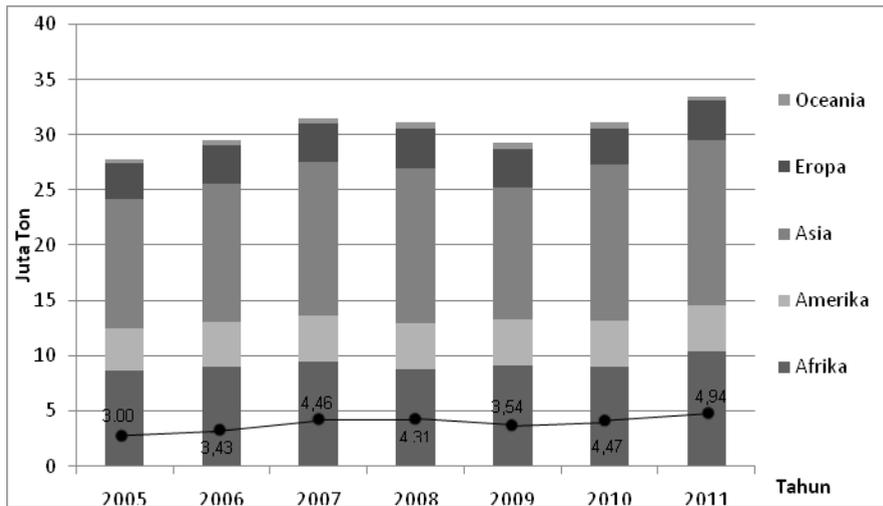
A. Perdagangan Beras di Dunia dan Wilayah Negara-Negara Asia Tenggara

1. Impor Beras dari Wilayah Negara-Negara Asia Tenggara ke Pasar Dunia

Impor beras dilakukan oleh banyak negara-negara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negerinya. Di pasar dunia, impor beras didominasi oleh Bangladesh, Korea Selatan, Irak, Jordania, Arab, dan Turki. Oleh sebab itu secara umum wilayah Asia memiliki kontribusi terbesar terhadap total impor beras dunia dengan kontribusi mencapai 44,46 persen. Sedangkan kontribusi dari impor beras wilayah Asia Tenggara mencapai 14,72 persen terhadap impor beras di pasar dunia atau senilai USD1,80 miliar.

²⁴ Kenneth B. Young, Eric J. Wailes, Gail L. Cramer, and Nguyen Tri Khiem, "Vietnam's Rice Economy: Developments and Prospects", Research Report 968, Arkansas Agricultural Experiment Station, Arkansas, 2002, h. 31.

²⁵ Food and Agriculture Organization, *Trade Liberalization and Food Security in Developing Countries in Trade Reforms And Food Security: Conceptualizing The Linkages*, Rome: FAO, 2003), h. 52. (Based on a paper by Oliver Morrissey, *Costs, Benefits and Risks from Trade: Theory and Practice for Food Security*. Presented at the FAO Expert Consultation on Trade and Food Security: Conceptualizing the Linkages. Rome 11-12 July 2002.

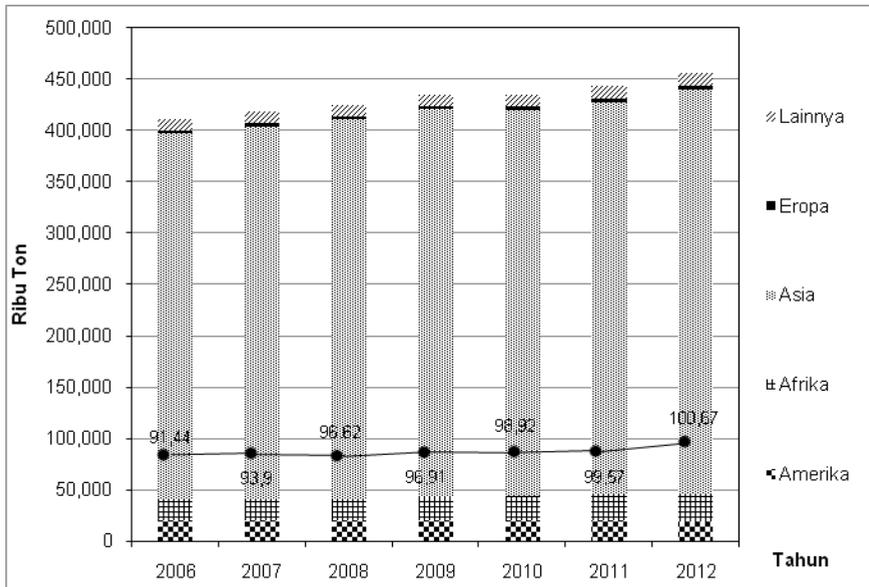


Sumber: FAO, 2013.

Gambar 1. Perkembangan Impor Beras di Pasar Dunia Tahun 2005-2011

Pada tahun 2013, FAO memprediksikan impor beras di pasar dunia berkontraksi dibandingkan tahun 2012. Cina, Indonesia, dan Iran menjadi negara-negara yang berkontribusi terhadap pengurangan impor beras tersebut. Hal ini karena kombinasi dari hasil panen yang tinggi dan banyak negara yang memperbaharui kembali stok dengan membeli beras dalam jumlah besar pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, Cina mengimpor sebanyak 2,4 juta ton dan pada Maret 2013 Cina juga mengimpor sebanyak 691 ribu ton beras dari Vietnam dan Pakistan serta dari Thailand, khususnya untuk beras aromatik. Sejak tahun 2012, Cina banyak membeli beras dengan kualitas rendah untuk bahan baku industri pangan dan alkohol dari beras. Sedangkan Indonesia, impornya cenderung menjadi 1,8 juta ton di mana masih lebih rendah dari tahun 2011 yang mencapai 2,9 juta ton. Pemerintah Indonesia berusaha mencari sumber ketersediaan beras sebesar 3,2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan stok 2 juta ton setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan intervensi pasar dan program beras miskin (raskin). Pada Januari 2014, besarnya program raskin akan meningkat dari 5 kg beras menjadi 20 kg beras per rumah tangga, dengan harga Rp1.600 per kg, dan dengan jumlah rumah tangga yang berhak menerima raskin menurun dari 17,5 juta pada tahun 2012 menjadi 15,5 juta pada tahun 2013. Sedangkan Iran juga telah memperbaharui stoknya sebesar 1,3 juta ton pada tahun 2012. Permintaan beras impor Iran mencapai setengah dari kebutuhan pangan nasionalnya, di mana permintaan ini untuk menyediakan pangan bagi masyarakat miskin terkait dengan subsidi beras, daging, dan minyak sayur setiap tiga bulan.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan karena tingkat inflasi yang tinggi dan depresiasi Rial di tengah-tengah sanksi internasional.²⁶



Sumber: USDA, 2013.

Gambar 2. Perkembangan Konsumsi Beras di Dunia Tahun 2006-2012

Di pasar dunia, konsumsi beras terbesar berada di wilayah Asia, di mana kontribusi konsumsinya rata-rata lebih dari 86 persen pada periode tahun 2006 hingga tahun 2012. Sedangkan konsumsi beras di wilayah Asia Tenggara rata-rata mencapai lebih 22 persen terhadap konsumsi beras di dunia. Besarnya kontribusi tersebut dikarenakan beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90 persen oleh penduduk di wilayah Asia dan lebih dari 22 persennya dikonsumsi oleh penduduk di Asia Tenggara.²⁷ Selain itu adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang besar dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara yang membutuhkan bahan pangan pokok tersebut. Misalnya Indonesia dengan populasi penduduk mencapai lebih dari 240 juta orang (terbesar di kawasan Asia Tenggara) membutuhkan konsumsi beras sebesar rata-rata 38,58 persen terhadap konsumsi beras di dunia. Sedangkan Vietnam membutuhkan konsumsi beras rata-rata sebesar 19,74 persen dan Filipina sebesar 13 persen dari konsumsi beras di dunia.

²⁶ Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Rice Market Monitor", Trade and Markets Division Food and Agriculture Organization of the United Nations, Volume XVI - Issue No. 2, 2013, Rome, h. 17-18.

²⁷ Samarendu Mohanty, *Op.Cit.*,

Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan negara-negara pengimpor beras dari pasar dunia. Pada tahun 2011, wilayah Asia Tenggara mengimpor beras 6,6 juta ton atau sekitar 20 persen dari total perdagangan dunia. Thailand dan Vietnam menjadi negara penyuplai ketiga negara tersebut.²⁸ Pada tahun 2005 hingga tahun 2012, laju pertumbuhan impor beras mencapai 14,08 persen. Di Filipina, larangan impor beras dari Thailand dan Vietnam diberlakukan ketika panen raya padi.²⁹ Sedangkan di Indonesia, menurut Bustanul Arifin³⁰ ada tiga alasan utama terjadi impor pangan, yaitu (1) rusaknya sumber air di hulu (52 persen jaringan irigasi bermasalah), subsidi pupuk dan benih masih jauh dari sasaran, dan ketidakpahaman pemimpin pemda dalam kebijakan pangan yang diindikasikan dengan adanya konversi lahan sawah 100 ribu hektar per tahun, (2) pasar pangan tidak simetris, di mana hal ini ditandai dengan sistem rantai nilai komoditas pangan tidak efisien karena keterbatasan infrastruktur dan logistik, dan (3) diversifikasi pangan yang relatif rendah.

Tabel 1. Perkembangan Impor Beras Negara-Negara Asia Tenggara dari Pasar Dunia Tahun 2005-2011

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Brunei	33.332	44.581	33.740	37.861	38.689	45.246	33.679
Kamboja	40.209	32.921	48.895	27.600	19.794	70.987	12.128
Indonesia	188.944	455.850	1.403.331	288.359	248.454	685.768	2.745.281
Laos	22.327	17.298	24.628	23.734	43.040	42.773	17.071
Malaysia	583.654	820.480	778.894	1.106.743	1.086.616	930.583	1.031.033
Myanmar	2.096	10.500	3.149	81.000	23.000	1.589	3.076
Filipina	1.821.641	1.716.315	1.805.616	2.432.001	1.775.113	2.378.045	706.471
Singapura	281.551	301.539	326.650	288.276	277.991	310.263	361.480
Thailand	2381	1630	3154	13609	20834	5269	10630
Timor-Leste	24000	27000	26508	8741	3783	1301	14061
Vietnam	340	575	2080	683	847	983	2409

Sumber: FAO, 2013.

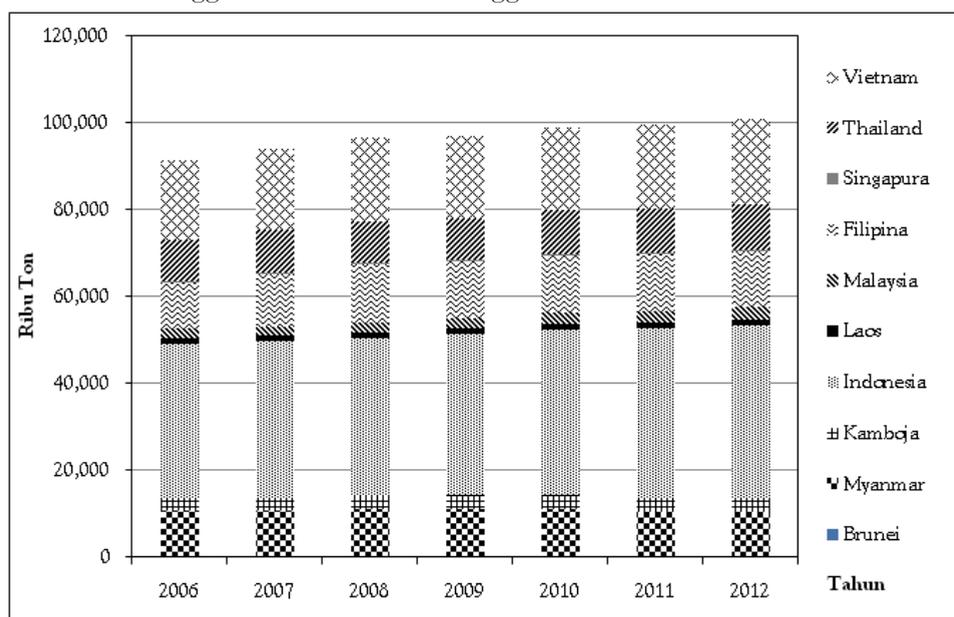
Secara lebih detail berdasarkan wilayah perdagangan maka wilayah Asia Tenggara menjadi wilayah dengan konsumsi beras terbesar ketiga, yaitu

²⁸ Katherine Baldwin, Nathan Childs, John Dyck, and Jim Hansen, *Op.Cit.*, h. 27.

²⁹ Normalyn Yap, "Why Does the Philippines Import Rice: A Solution to the Rice Shortage", (Taichung, National Chung Hsing University, tidak ada tahun), http://www.nodai.ac.jp/cip/iss/english/9th_iss/fullpaper/1-1-5nchu-tibao.pdf, diakses 27 September 2013), h. 1-3

³⁰ "Negara Wajib Intervensi Pangan", Suara Pembaharuan, Selasa 3 Desember 2013.

sebesar 100,67 ribu ton pada tahun 2012 berdasarkan data *United State Departement of Agriculture-production, supply and distribution online (USDA-PSD Online)* setelah Asia Timur dan Asia Selatan. Konsumsi beras Indonesia sendiri memiliki *share* sebesar 38,94 persen terhadap total konsumsi di wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 2012 konsumsi negara-negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) sebesar 34,74 juta ton, di mana nilai tersebut lebih rendah dari negara-negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina (ASEAN-6) yaitu 65,93 juta ton. Laju pertumbuhan konsumsi beras di negara-negara CLMV relatif lebih rendah (rata-rata 1,47 persen) dibandingkan negara-negara anggota ASEAN-6 (rata-rata 2,91 persen), di mana Brunei Darussalam memiliki laju pertumbuhan konsumsi tertinggi dari tahun 2005 hingga tahun 2012.



Sumber: USDA, 2013.

Gambar 3. Perkembangan Konsumsi Beras Negara-Negara Asia Tenggara Tahun 2006-2012

Indonesia memiliki konsumsi beras terbesar di Asia Tenggara. Menurut data Kementerian Pertanian, konsumsi beras penduduk Indonesia mencapai 107,71 kg per kapita per tahun pada tahun 2002 menjadi 97,65 kg per kapita per tahun pada tahun 2012. Nilai tersebut hampir dua kali lipat dari konsumsi beras dunia, yang hanya 60 kg per kapita per tahun. Konsumsi beras di Korea mencapai 40 kg per kapita per tahun, Jepang 50 kg per tahun, Malaysia 80 kg per tahun, dan Thailand 70 kg per tahun. Tingginya angka konsumsi beras

nasional karena beras menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari budaya pangan nasional.³¹ Selain tingginya konsumsi beras, alasan lain masih dilakukan impor beras adalah untuk menjaga pasokan beras yang cukup di dalam negeri sehingga dapat menjaga kestabilan harga.³² Target surplus yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia sebesar 10 juta ton per tahun, sedangkan stok di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) dan produksi padi dari petani belum mampu untuk memenuhi target tersebut. Produksi setara beras per tahun mencapai 38 juta ton, sedangkan kebutuhan beras di Indonesia sebesar 34 juta ton, sehingga masih ada surplus 4 juta ton di gudang Bulog dan belum mencapai 10 juta ton.³³ Beberapa negara-negara mitra dagang Indonesia dalam melakukan impor, antara lain Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar.

Di wilayah Indonesia pada umumnya belum memiliki pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Hanya sembilan provinsi yang mampu mencapai skor mutu pangan di atas 80. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan beragam, dan bergizi seimbang belum menjadi pola konsumsi pangan penduduk rata-rata nasional. Konsumsi pangan penduduk masih didominasi oleh sumber karbohidrat terutama padi-padian khususnya beras. Konsumsi di beberapa sentra produksi pangan cenderung memiliki kualitas konsumsi pangan yang rendah, seperti Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (skor PPH di bawah 77). Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan pangan yang memadai di suatu wilayah belum menjamin konsumsi pangan yang berkualitas, karena pola konsumsi pangan sangat erat kaitannya dengan pola perilaku, pengetahuan gizi, preferensi, dan budaya makan penduduk.³⁴

Pemerintah Indonesia mencoba untuk mengurangi konsumsi beras tersebut dengan program diversifikasi konsumsi pangan. Di Indonesia masih tersedia banyak alternatif makanan yang dapat dikonsumsi. Program Upaya Pengembangan Pangan Lokal (MP3L) saat ini sedang dilakukan di 30 kabupaten yang tersebar di 18 provinsi. Kegiatan tersebut mengacu pada target diversifikasi konsumsi pangan Kementerian Pertanian untuk

³¹ "Konsumsi Beras Nasional Tertinggi Se-Asia, Diversifikasi Pangan harus Digenjot", (<http://www.neraca.co.id/harian/article/26605/Konsumsi.Beras.Nasional.Tertinggi.SeAsia>, diakses 23 Agustus 2013).

³² Maikel Jefriando, "Indonesia Masih Getol Impor Beras dari 5 Negara Ini", (<http://finance.detik.com/read/2013/08/20/082447/2334699/4/indonesia-masih-getol-impor-beras-dari-5-negara-ini>, diakses 21 Agustus 2013).

³³ "Impor Beras untuk Ketahanan Pangan, <http://www.investor.co.id/agribusiness/impor-beras-untuk-ketahanan-pangan/45538>, diakses 21 Agustus 2013).

³⁴ Kementerian Pertanian, *Road Map Diversifikasi Pangan 2011-2015*, Edisi 2, (Jakarta: Badan Ketahanan Pangan-Kementerian Pertanian, 2012), h. 31-32.

menurunkan konsumsi beras minimal 1,5 persen per tahun per kapita dan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 77,3 persen pada tahun 2011 menjadi 93,3 persen pada tahun 2014.³⁵

Di luar wilayah Asia Tenggara, pertumbuhan konsumsi beras per kapita di Sub Sahara Afrika meningkat lebih dari 50 persen, begitu pula di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hal ini karena adanya aktivitas penduduk yang melakukan diversifikasi protein ke pangan berserat, peningkatan jumlah imigran Asia, dan intervensi pemerintah melalui harga dan distribusi pangan bersubsidi. Jadi jika diversifikasi di wilayah Asia dan Asia Tenggara berjalan lambat maka hal ini dapat terkompensasi dengan peningkatan konsumsi beras per kapita di wilayah Afrika dan negara-negara lainnya.³⁶

2. Impor Beras Antarnegara di Wilayah Asia Tenggara

Berdasarkan data dari UN *Comtrade* tahun 2012, jagung menjadi komoditas utama (93,51 persen) yang diperdagangkan antarnegara Asia Tenggara dibandingkan beras (4,51 persen) dan komoditas lainnya. Jagung menjadi komoditas dengan rentang penggunaan yang lebih lebar dari beras, di mana selain sebagai pangan juga sebagai pakan dan banyak digunakan oleh industri-industri pengolahan. Pada tahun 2020, diprediksikan permintaan jagung di Asia Tenggara mencapai lebih dari 40 juta ton.³⁷ Negara-negara pengimpor utama beras dari wilayah Asia Tenggara adalah Vietnam, Thailand, dan Singapura.

Tabel 2. Impor Beras pada Intra Negara-Negara Asia Tenggara Tahun 2008-2012

(dalam ribu USD)

Negara	2008	2009	2010	2011	2012
Total ASEAN	2.564.734	1.812.835	2.451.093	3.054.105	500.857
Thailand	1.027.129	463.069	706.782	987.265	441.946
Singapura	5.680	11.277	21.965	51.461	57.064
Filipina	2.587	383	465	622	794
Indonesia	479	257	450	414	571
Malaysia	587	139	340	364	482

³⁵ “Konsumsi Beras Nasional Tertinggi Se-Asia, Diversifikasi Pangan harus Digenjot”, *Op.Cit.*

³⁶ Samarendu Mohanty, *Op.Cit.*

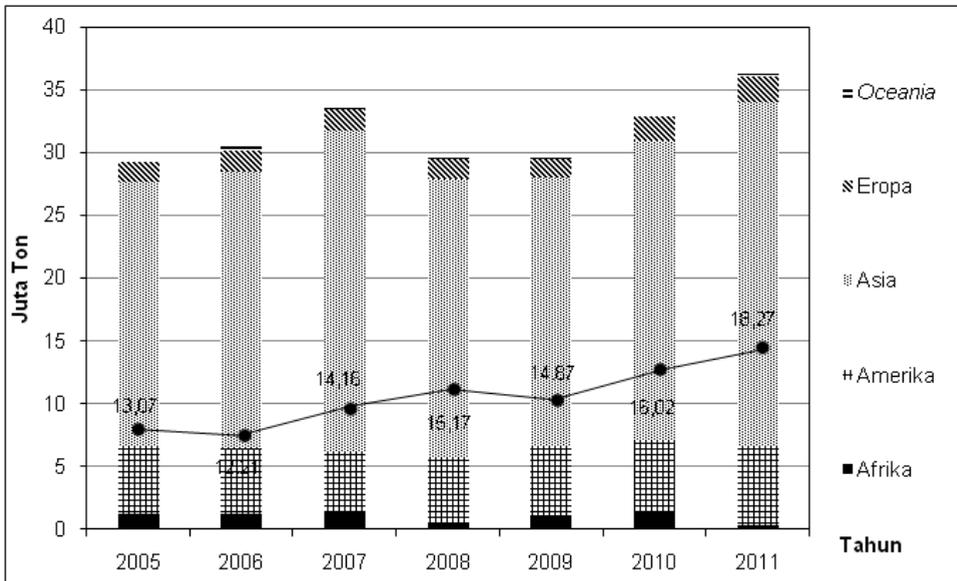
³⁷ Bekele Shiferaw, Jonathan Hellin, Vijesh Krishna, Olaf Erenstein, and Sika Gbegbelegbe, “Changing Demand Pathterns and Maize Value Chains in Asia”, 11th Asian Maize Conference November 7-11 2-11-Nanning, China-International Maize and Wheat Improvement Cente-CIMMYT, (<http://www.slideshare.net/CIMMYT/s71-changing-demand-patterns-and-maize-value-chains-in-asia>, diakses 4 Oktober 2013).

Myanmar	na	na	10.141	na	na
Kamboja	1.280	1.292	1.178	13.480	na
Vietnam	1.526.992	1.336.418	1.709.772	2.000.499	na

Sumber: www.intracen.org, 2013

3. Ekspor Beras dari Wilayah Negara-Negara Asia Tenggara ke Pasar Dunia

Berdasarkan data FAO, ekspor beras di pasar dunia didominasi ekspor dari negara-negara Asia. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki kontribusi ekspor beras ke pasar dunia mencapai lebih dari 50 persen. Jumlah beras yang diekspor ke pasar dunia cenderung meningkat yaitu mencapai 36,26 juta ton pada tahun 2011 atau bernilai USD6,15 miliar dan menjadi 38,60 juta ton pada tahun 2012. Sedangkan laju pertumbuhan ekspor berasnya antara tahun 2005-2012 mencapai 2,21 persen.



Sumber: FAO, 2013.

Gambar 4. Perkembangan Ekspor Beras di Pasar Dunia Tahun 2005-2011

Pada tahun 2013, FAO memprediksikan ekspor beras di dunia akan mencapai 37,4 juta ton yang banyak disumbangkan dari pembelian oleh Indonesia, Korea Selatan, Nepal, Thailand, Nigeria, dan Senegal. Jumlah tersebut 3 persen lebih rendah dari tahun 2012. Hal ini disebabkan karena kontraksi ekspor beras sebesar 3 persen dari India dan adanya tarikan permintaan berupa pengurangan impor dari negara-negara Asia dan Afrika karena negara-negara tersebut memiliki stok beras domestik yang memadai. Selain itu beberapa negara-negara eksportir beras didukung oleh strategi

kebijakan harga yang fleksibel dan upaya-upaya ekspansif ke pasar-pasar baru, seperti Vietnam, Pakistan, dan Amerika Serikat sehingga diprediksikan memiliki jumlah ekspor yang lebih besar dari tahun sebelumnya.³⁸

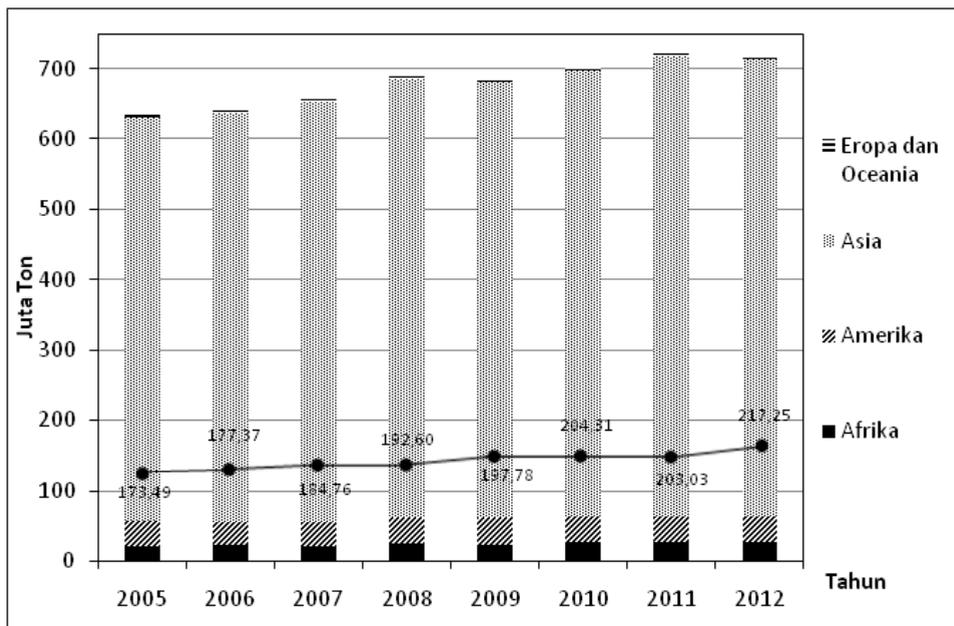
Produksi di dalam negeri di masing-masing wilayah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ekspor. Produksi padi dunia pada tahun 2012, menurut data FAO mencapai 718,34 juta, di mana jumlah tersebut menurun sebesar 0,58 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi ini banyak disumbangkan dari penurunan produksi padi India sebagai produsen utama padi di dunia. Pada musim tanam padi tahun 2013, FAO mengestimasi bahwa produksi padi dunia sebesar 746,7 juta ton atau meningkat 2,1 persen dari tahun 2012 dengan asumsi didukung oleh iklim yang mendukung dan luasan tanam padi seluas 163,6 juta hektar.

Pada tahun 2011, ekspor negara-negara Asia Tenggara mencapai 18,27 juta ton dan meningkat 14,08 persen dari tahun sebelumnya. Secara umum, negara-negara Asia Tenggara mendistribusikan beras ke berbagai pasar di dunia. Tujuan utama ekspor beras di luar wilayah Asia Tenggara adalah Sub Sahara Afrika dan sisanya baru ke negara lainnya. Meskipun banyak pasar ekspor beras, namun target pasar dan tipe beras yang diekspor berbeda-beda.³⁹ Contohnya ekspor beras Thailand tahun 2011 didominasi jenis beras yang telah digiling (40 persen), *parboiled* atau beras setengah masak (31 persen), beras aromatik (22 persen), beras merah (2 persen), beras ketan (2 persen), dan beras pecah (3 persen). Sedangkan Vietnam banyak mengeksport beras jenis *indica* dengan kualitas menengah dan rendah ke Thailand. Hal ini memungkinkan beras Vietnam bersaing di pasar dunia dengan harga kompetitif.⁴⁰

³⁸ Food and Agriculture Organization of the United Nations, *Op.Cit.*, h. 16 and 20.

³⁹ Katherine Baldwin, Nathan Childs, John Dyck, and Jim Hansen, *Op.Cit.*, h. 24-25.

⁴⁰ Chantal Pohl Nielsen, "Vietnam's Rice Policy: Recent Reforms and Future Opportunities", Danish Research Institute of Food Economics, Vietnam's Rice Policy, no year, h. 4-5.



Sumber: FAO, 2013.

Gambar 5. Perkembangan Produksi Padi di Dunia Tahun 2005-2012

Jika dilihat dari secara regional maka wilayah Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar menjadi negara-negara pengekspor beras terbesar ke pasar dunia. Misalnya di Vietnam, sebagai bagian dari *doi moi (renovation)* program reformasi kebijakan yang dimulai tahun 1986, Pemerintah Vietnam mulai memberikan peran pasar yang lebih besar dalam alokasi sumber daya ekonomi. Salah satunya melalui kebijakan desentralisasi produksi pertanian. Reformasi tersebut membantu Vietnam menjadi negara eksportir beras pada tahun 1989 yang sebelumnya pada tahun 1980an masih menjadi importir beras.⁴¹

Tabel 3. Perkembangan Ekspor Beras Negara-Negara Asia Tenggara ke Pasar Dunia Tahun 2005-2011

(Ribuan Ton)

Negara	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Brunei	0,00	0,37	0,00	0,14	5,17	0,25	4,90
Kamboja	2,32	5,23	2,98	5,54	17,22	51,18	174,05
Indonesia	42,29	0,94	1,19	1,84	2,40	0,35	0,80
Malaysia	5,39	4,47	0,22	0,91	0,56	0,41	0,66
Myanmar	180,23	71,34	358,70	221,88	250,34	121,87	224,24

⁴¹ Chantal Pohl Nielsen, *Ibid.*, h. 2, 4-5.

Filipina	0,20	0,71	0,61	0,82	0,16	0,17	0,40
Singapura	83,57	68,88	77,15	13,95	32,40	45,66	85,96
Thailand	7.508,58	7.414,59	9.165,20	10.186,68	8.594,92	8.905,75	10.671,19
Timor-Leste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vietnam	5.250,00	4.642,00	4.558,00	4.735,17	5.968,59	6.892,96	7.112,00

Sumber: FAO, 2013.

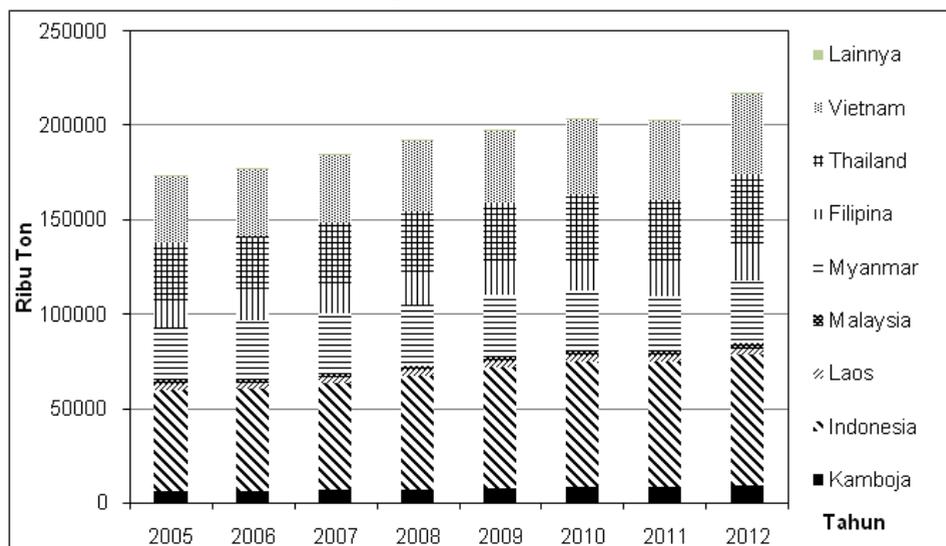
Pada tahun 2012, lebih dari 30 persen produksi padi di dunia terdapat di wilayah Asia Tenggara. Produksi padi meningkat lebih dari 25 persen antara tahun 2005 hingga tahun 2012 atau tumbuh sebesar 3,27 persen per tahun. Hal ini distimulasi oleh perluasan areal tanam padi walaupun saat ini justru pertumbuhannya melambat. Indonesia, Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Filipina mendominasi dalam memproduksi padi. Namun demikian produksi tersebut ditopang oleh petani dengan skala usaha antara 0,5 hingga 2 hektar. Jenis padi yang banyak diusahakan di wilayah Asia Tenggara adalah *indica*⁴². Dari subspecies *indica*, beberapa juta ton padi ketan kebanyakan diproduksi oleh Thailand dan Laos, serta beberapa juta ton beras aromatik diproduksi oleh Thailand.

Jika dikelompokkan antara negara-negara yang berada di semenanjung Asia Tenggara (Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Thailand) dan negara kepulauan (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam), ternyata negara-negara di semenanjung Asia Tenggara memiliki produksi padi yang lebih tinggi daripada negara-negara kepulauan di Asia Tenggara. Hal ini salah satunya karena dukungan beberapa sistem sungai besar yang menyediakan kebutuhan air untuk lahan padi tadah hujan. Sedangkan di negara-negara kepulauan justru tidak banyak sistem sungai besar dan lebih banyak menggunakan sistem irigasi.⁴³ Adapun total luas areal tanam padi di kawasan Asia Tenggara mencapai 42.676 ribu hektar pada tahun 1999-2001 dan meningkat menjadi 46.105 ribu hektar pada tahun 2009-2011 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,9 persen untuk negara-negara di Semenanjung Asia Tenggara dan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,5 persen. Selain itu komoditas padi yang memiliki nilai komoditas lebih tinggi dan *cash flow* yang relatif lebih cepat dibandingkan tanaman lainnya telah mendorong ekstensifikasi padi. Contohnya perluasan di delta sebelah utara Vietnam

⁴² Menurut IRRI, *Oryza sativa* atau padi Asia merupakan jenis padi yang paling banyak ditanam dan dimakan. Asal jenis padi ini dari daerah antara India-Himalaya dan Indocina serta memiliki dua subspecies yaitu *indica* dan *japonica*. Subspecies *Indica* lebih banyak ditanam karena kelebihanannya dalam umur tanaman dan tinggi tanaman yang lebih pendek dibandingkan *japonica*.

⁴³ *Ibid.*, h. 3.

(dekat Hanoi) dan pulau Jawa di Indonesia. Kedua wilayah ini sangat padat penduduknya namun budidaya padi masih intensif dilakukan.



Sumber: FAO, 2013.

Gambar 6. Perkembangan Produksi Padi di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2005-2012

4. Ekspor Beras Antarnegara di Wilayah Asia Tenggara

Berdasarkan data dari UN *Comtrade* tahun 2012, beras menjadi komoditas utama ekspor (93,94 persen) dibandingkan komoditas biji-bijian lainnya, seperti jagung (5,70 persen). Pada tahun 2005 hingga tahun 2012, laju pertumbuhan ekspor beras negara-negara di kawasan Asia Tenggara tumbuh sebesar 12,10 persen. Ekspor dari wilayah negara-negara Asia Tenggara ke wilayah negara-negara Asia Tenggara lainnya sendiri banyak distimulasi dari negara-negara di semenanjung menuju ke negara-negara kepulauan di Asia Tenggara.

Tabel 4. Ekspor Beras pada Intra Negara-Negara ASEAN Tahun 2008-2012 (dalam ribu USD)

Negara	2008	2009	2010	2011	2012
Total ASEAN	2.887.775	1.843.445	2.508.757	2.613.751	1.833.249
Indonesia	114.889	91.398	342.544	1.481.320	756.517
Malaysia	776.169	517.314	435.514	521.075	520.058
Filipina	1.797.124	1.035.421	1.527.759	373.156	364.552
Singapura	188.439	166.413	191.976	225.309	183.025

Thailand	5.235	16.124	3.302	6.522	9.097
Kamboja	2.192	2.578	939	2.417	na
Vietnam	3.727	14.197	6.723	3.952	na

Sumber: www.intracen.org, 2013. Keterangan: na: *no data available*.

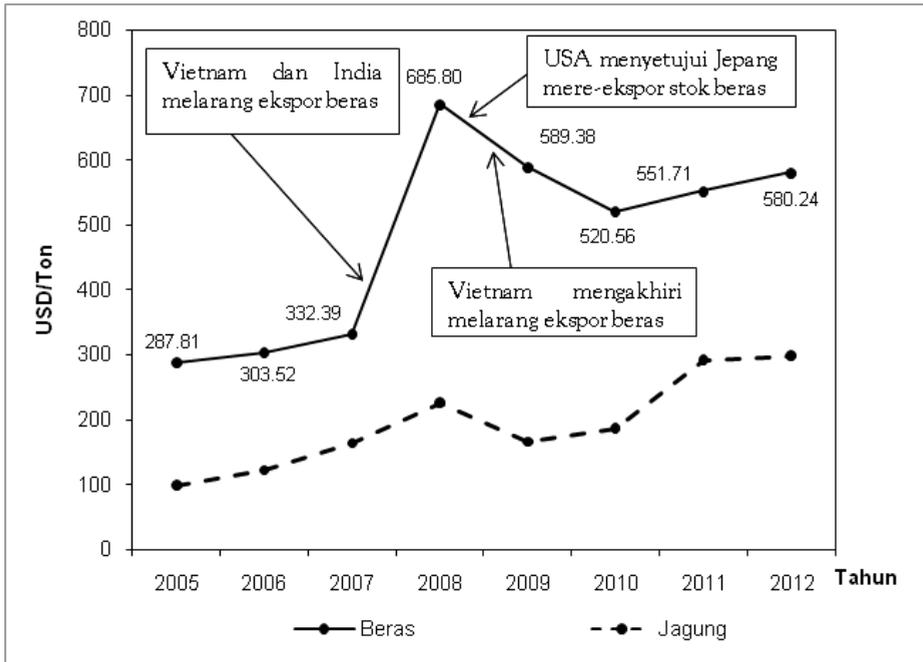
Jika dilihat berdasarkan negara pengekspor, Indonesia merupakan pengekspor beras terbesar di kawasan Asia Tenggara (99,28 persen). Berdasarkan data FAO, pada tahun 2011 Indonesia merupakan negara produsen terbesar dengan tingkat pertumbuhan produksi mencapai 2,60 persen di samping Vietnam dan Thailand. Produksi padi (sawah dan ladang) Indonesia mencapai 65,7 juta ton pada tahun 2011, lalu meningkat menjadi 69,05 juta ton pada tahun 2012. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat bahwa Indonesia mencapai rekor terbaru panen padi pada kuartal satu tahun 2013 mencapai 72,1 juta ton atau meningkat 4,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut masih memungkinkan untuk terus naik dikarenakan dari ketersediaan sumber daya lahan dan air, kemajuan teknologi, serta dukungan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian, produksi padi nasional masih bisa ditingkatkan. Untuk perluasan areal sawah, tersedia lahan seluas 8,28 juta hektar dan 60 persen di antaranya dapat dikembangkan menjadi lahan sawah irigasi dan tadah hujan dan sisanya merupakan lahan rawa. Potensi pengembangan lahan sawah di Papua, Kalimantan, dan Sumatera pun cukup besar yang perlu digali untuk meningkatkan ketahanan pangan penduduk. Sedangkan guna mengamankan posisi ekspor, skenario yang direkomendasikan adalah memperluas areal tanam melalui peningkatan indeks pertanaman (IP), disertai dengan upaya peningkatan produktivitas (skenario ekspor). Berdasarkan potensi yang dimiliki, peluang ekspor beras meningkat menjadi 5,18 juta ton dan 5,93 juta ton berturut-turut pada tahun 2015 dan tahun 2020. Surplus produksi akan lebih meningkat lagi apabila pembukaan lahan baru seluas 1,5 juta ha dapat terealisasi. Dorongan untuk ekspor seyogianya dilandasi dengan keuntungan yang dapat diperoleh, harga beras di pasar internasional, serta keberhasilan penyediaan beras yang cukup bagi seluruh penduduk Indonesia. Kecukupan pangan di tingkat nasional belum tentu dibarengi dengan ketersediaan yang cukup di tingkat rumah tangga karena berkaitan dengan daya beli dan distribusinya.

IRRI mengestimasi bahwa Indonesia akan membutuhkan 38 persen lebih beras pada 25 tahun yang akan datang, yang berarti bahwa rata-rata produksi padi 4,6 ton per hektar harus dinaikkan menjadi lebih dari 6 ton per hektar. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mencapai sasaran

produksi padi dan beras antara lain melalui: (1) penciptaan varietas benih unggul bermutu, misalnya padi hibrida, padi sawah, dan padi gogo; introduksi varietas benih unggul padi baru; dan penerapan berbagai paket teknologi spesifik lokasi, (2) pelaksanaan Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Tepadu, (3) penyaluran pupuk bersubsidi dan penyaluran bantuan benih unggul bermutu padi, (4) penyaluran cadangan benih nasional padi, (5) pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman padi, (6) upaya intensifikasi melalui gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (GP3K) yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (7) perluasan areal pertanaman padi melalui pencetakan lahan sawah seluas, peningkatan indeks pertanaman padi melalui *System of Rice Intensification* (SRI), pengembangan jaringan irigasi, dan pengembangan mekanisasi melalui penyebaran alat dan mesin pertanian, (8) penurunan kehilangan hasil dilakukan dengan memberikan bantuan sarana pascapanen, misalnya *power thresher*, *paddy mower*, *dryer*, dan alat lainnya, (9) penyuluhan dan pendampingan, dan (10) penyusunan *roadmap* peningkatan produksi beras nasional mendukung pencapaian surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014.

B. Harga Beras

Dari perspektif ketahanan pangan maka adalah penting untuk mengetahui apa menyebabkan volatilitas harga beras dan pengaruhnya terhadap perdagangan beras. Menurut hasil penelitian Ramon L. Clarete dengan menggunakan *gravity model*, hasil estimasi regresi perdagangan beras menunjukkan bahwa volatilitas harga beras yang ekstrim berdampak negatif terhadap perdagangan beras yang tipis. Di wilayah negara-negara Asia Tenggara yang sedang berkembang, beras memiliki kontribusi besar dalam menu makan sehari-hari. Peningkatan harga beras lebih lanjut dapat menstimulasi tekanan terhadap inflasi dan menurunkan daya beli masyarakatnya. Oleh sebab itu pemerintah banyak melakukan kebijakan berupa intervensi pasar beras untuk menjaga stabilitas harga beras dan pangan secara umum. Kebijakan perberasan di dalam negeri di negara eksportir dan importir beras utama dunia pada akhirnya juga akan mempengaruhi volatilitas harga beras di pasar dunia dalam jangka pendek. Larangan, hambatan, dan pajak yang diimplementasikan beberapa negara pengeksportir utama menjadi faktor yang signifikan terhadap kenaikan harga beras dunia pada tahun 2008. Pada akhir September tahun 2007 terjadi peningkatan harga beras dunia hingga dua kali lipat, yaitu dari April tahun 2001 (USD170 per ton untuk beras Thailand jenis 100 persen B) dan September 2007 (USD333 per ton).



Sumber: Indexmundi, 2013.

Gambar 7. Perkembangan Harga Beras Dunia Tahun 2005-2012

Bagi wilayah Asia, peningkatan harga beras dunia tersebut banyak direspon dengan kebijakan stabilisasi harga beras domestik sehingga tidak secara substansial mempengaruhi harga beras di dalam negeri.⁴⁴ Misalnya kebijakan Pemerintah Vietnam pada awal tahun 2007 melarang penjualan beras secara komersial, kecuali penjualan pemerintah kepada pembeli reguler seperti Filipina dan Kuba. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras di dalam negerinya, walaupun Pemerintah Vietnam telah memiliki komitmen melakukan ekspor beras pada tahun 2007.⁴⁵ Misalnya di Thailand, setelah pemerintahan baru terbentuk dari pemilihan di awal tahun 2008, kebijakan Pemerintah Thailand sebenarnya tidak melarang ekspor beras. Di sisi lain Pemerintah Thailand tidak melepas stok beras sebesar 2,1 ton karena untuk mendukung program harga pembelian dari petani sejak tahun 2005 walaupun hal itu tidak dapat menahan penjual swasta menjualnya ke pasar beras dunia. Contoh lainnya, Indonesia berusaha tidak banyak bersentuhan dengan pasar beras dunia guna menanggulangi harga beras yang sangat tinggi sejak tahun 2004. Tingginya harga beras ini berkaitan erat dengan ketahanan pangan dan dukungan politik. Filipina dan Vietnam juga berusaha

⁴⁴ *Ibid.*, h. 165-166.

⁴⁵ Nathan Childs and James Kiawu, *Op.Cit.*, h. 6-8.

memperketat hubungan ekspor dan impor yang saling menguntungkan dan saling menjaga stabilitas harga beras domestiknya.

Ekspektasi terhadap perubahan harga beras karena ekonomi negara yang terbuka dalam perdagangan beras. Perubahan harga beras mendorong pencegahan penimbunan beras di tingkat petani, trader, dan konsumen. Hal ini terjadi di Filipina dan Vietnam, di mana stok beras pemerintah pada posisi yang rendah tetapi stok beras sektor swasta justru tinggi. Suplai yang cukup di kedua negara dilakukan dengan kebijakan larangan ekspor dan tidak mengizinkan sektor swasta menentukan harga sendiri antara pasar domestik dan dunia. Pada awalnya harga retail beras meningkat pada tahun 2008 lalu kembali normal. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia dan Thailand, di mana muncul kartel ekspor, di mana Pemerintah Thailand mengizinkan ekspor dan harga beras domestik mengikuti harga beras dunia. Selama beberapa bulan Thailand menjadi satu-satunya negara yang masih melakukan ekspor. Meskipun harga beras domestik naik 131 persen dari awal tahun 2007 hingga ke awal tahun 2008, tetapi dampaknya terhadap tingkat inflasi relatif sedang. Hal ini ditunjukkan dengan harga makanan dan minuman naik hanya 36,1 persen terhadap indeks harga konsumen. Inflasi menjadi fenomena makroekonomi saja dan tidak menjadi fenomena pangan di Thailand. Di sisi lain, harga beras yang sangat tinggi di Indonesia, bukan karena harga beras dunia yang mempengaruhi harga domestiknya. Penurunan harga domestik beras yang tajam antara awal tahun 2007 hingga awal tahun 2008 karena adanya panen raya dan dukungan musim. Sedangkan inflasi pangan banyak disumbangkan dari harga minyak kelapa sawit dan biaya tahu dan tempe (tingginya impor kedelai). Inflasi pangan awal tahun 2008 di Indonesia dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand, namun keduanya memiliki perbedaan pengaruh harga beras dunia terhadap harga di dalam negerinya.⁴⁶

Pada tahun 2009 hingga tahun 2011, beberapa negara terus berlanjut merespon fluktuasi harga beras dengan berbagai kebijakan. Pada Maret 2009 Kementerian ASEAN dalam bidang pertanian dan kehutanan mengadopsi ASEAN *Integrated Food Security Framework*. Pada April 2009, Brunei Darussalam melakukan kampanye untuk meningkatkan swasembada beras dari 3,12 persen tahun 2007 menjadi 60 persen pada tahun 2015 (18 ribu ton). Sedangkan pada Juli 2010, Kementerian Kambaja melakukan mendorong produksi padi dan kebijakan ekspor beras penggilingan. Di sisi lain Pemerintah Filipina mengadopsi program *Food Staples Sufficiency*. Pada Maret 2011 Indonesia juga melakukan pengenaan tarif impor pada beras, sedangkan India

⁴⁶ C. Peter Timmer, *Op.Cit.*, h. 27-29.

justru mencabut larangan ekspor beras *nonbasmati* dan mulai mengespor beras penggilingan. Oleh sebab itu pada September 2011, India menggunakan pasar beras dunia sebagai *outlet* untuk menjual stok berasnya yang surplus. Pada Agustus 2011, Indonesia dan Thailand menandatangani persetujuan ekspor beras sebesar 300 ribu ton. Dengan adanya musim panen raya Maret 2012, Pemerintah Vietnam membeli padi hingga 1 juta ton dari petani antara Maret hingga April guna menjaga stok untuk 3 bulan berikutnya.⁴⁷

C. Hambatan Perdagangan Beras Melalui Instrumen Tarif dan Nontariff di Wilayah *Association of Southeast Asian Nations*

Terbentuknya pasar tunggal ASEAN-10 pada 1 Januari 2016 akan membuka peluang pasar yang semakin besar karena menurut data IMF melibatkan populasi hingga lebih dari 600 juta jiwa. Berdasarkan penelitian dari Rashid *et al* tahun 2009⁴⁸, ASEAN akan mendapatkan manfaat berupa *social welfare* dari (1) adanya *Association of Southeast Asian Nations Free Trade Area* (AFTA) sebesar USD10,1 miliar, (2) adanya ASEAN+1 sebesar USD38 miliar, dan (3) adanya AEC sebesar USD69,4 miliar. Sedangkan menurut Wongboonsin, Srisangnam, and Sermcheep tahun 2011⁴⁹, negara-negara yang diprediksikan mendapatkan manfaat yang tertinggi dari adanya aliran perdagangan barang-barang yang bebas akibat AEC adalah Indonesia (USD276,5 juta), Thailand (USD666,9 juta), dan Singapura (USD797,9 juta).⁵⁰

Instrumen kunci dari integrasi perdagangan adalah adanya penghapusan hambatan perdagangan, khususnya tarif. Melalui ATIGA⁵¹, ASEAN mengatur penghapusan tarif (produk yang masuk dalam *the sensitive and highly sensitive list*) dan nontarif pada tahun 2015. ATIGA mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan barang ke dalam suatu *comprehensive framework* yang menjamin sinergi dan konsistensi. Oleh sebab

⁴⁷ Ramon L. Clarete, *Op.Cit.*, h. 3-4.

⁴⁸ Suthiphand Chirathivat and Piti Srisangnam, "The 2030 Architecture of Association of Southeast Asian Nations Free Trade Agreements", ADBI Working Paper Series No. 419, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2013. h. 13.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 13.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 13.

⁵¹ ATIGA mengakomodasi dan penyempurnaan kesepakatan ASEAN di bidang perdagangan barang, yaitu CEPT-AFTA tahun 1992, *Mutual Recognition Arrangement* (MRA tahun 1998), e-ASEAN tahun 2000, Sektor Prioritas Integrasi tahun 2004, dan ASEAN *Single Window* (ASW) tahun 2005. Dalam hal pengurangan atau penghapusan tarif dan hambatan nontarif internal ASEAN, ATIGA menegaskan untuk menghapus seluruh tarif atas produk dalam kategori *Inclusion List* (IL) pada 1 Januari 2010 bagi ASEAN-6, dan tahun 2015-2018 bagi ASEAN-4 (CLMV), serta penghapusan hambatan nontarif pada 1 Januari 2010 bagi ASEAN-5, 1 Januari 2012 bagi Filipina, dan tahun 2015 bagi CLMV.

itu ATIGA diharapkan dapat meningkatkan transparansi, kepastian, dan meningkatkan AFTA-rules-based system yang sangat penting bagi komunitas bisnis di ASEAN. ATIGA juga mengamankan liberalisasi untuk dua belas *Priority Integration Sector* (PIS), yaitu produk pertanian, angkutan udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, kesehatan, produk karet, tekstil dan *apparel*, pariwisata, produk kayu, dan jasa logistik pada tahun 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2012 untuk negara CLMV. Bagi produk-produk dalam kategori *sensitive list* (SL) dan *high sensitive list* (HSL) harus masuk ke dalam skema *inclusion list* (IL) sesuai dengan jadwal yang disepakati. Salah satu contoh, komoditas yang masuk dalam HSL adalah beras. Setelah masuk ke dalam skema IL maka tarif produk-produk tersebut diturunkan menjadi 0-5 persen selambat-lambatnya pada tahun 1 Januari 2010 untuk negara ASEAN-6, tanggal 1 Januari 2013 untuk Vietnam, tanggal 1 Januari 2015 untuk Laos dan Myanmar, dan tanggal 1 Januari 2017 untuk Kamboja sesuai dengan ketentuan *Protocol on Special Arrangements for Sensitive Products*. Indonesia melakukan penyesuaian terhadap produk beras dan gula sebagaimana tercantum dalam *Protocol to Provide Special Consideration on Rice and Sugar*. Terdapat 16 pos tarif untuk gula dan beras yang diatur tersendiri melalui protokol tersebut dan akan masuk dalam IL pada tahun 2015. Fasilitas yang diberikan dalam kerangka *Common Effective Preferential Tariff Scheme* (CEPT) hanya dapat dinikmati oleh produk-produk yang berasal dari negara anggota ASEAN yang dibuktikan dengan sertifikat *rule of origin* (ROO) (*form D*).

Tabel 5. Jadwal Penghapusan Tarif Produk Kategori *Inclusion List* Negara ASEAN

Negara	Tahun Penghapusan Tarif <i>Inclusion List</i>		
	60 Persen Pos Tarif	80 Persen Pos Tarif	100 Persen Pos Tarif
ASEAN-6	2003	2007	2010
Vietnam	2006	2010	2015
Laos dan Myanmar	2008	2012	2015
Kamboja	2010	-	2015*

Keterangan: *: fleksibilitas hingga tahun 2018.

Sumber: Kementerian Perdagangan.⁵²

Dari tahun ke tahun, tingkat tarif yang diberlakukan antarnegara negara-negara ASEAN-10 cenderung menurun, di mana proteksi pada negara-negara ASEAN-6 cenderung menurun lebih cepat dibandingkan dengan negara CLMV. Untuk negara ASEAN-6 pada tahun 2010 dan negara CLMV pada tahun 2015, semua tarif impor akan dihapuskan dengan beberapa produk yang

⁵² Kementerian Perdagangan, *Menuju ASEAN Economy Community 2015*, Bagian Kerjasama Perdagangan Internasional, (Jakarta: Kementerian Perdagangan, tidak ada tahun), h. 21.

masih diperbolehkan mendapatkan fleksibilitas. Berdasarkan *review* jangka menengah dalam *Ha Noi Plan of Action* tahun 2001 maka pada tahun 2003 negara-negara ASEAN-6 akan menghapus tarif dari produk-produk dalam IL mereka sebesar 60 persen.⁵³ Beberapa negara-negara anggota ASEAN-10 yang kurang berkembang memiliki perhatian terhadap integrasi ekonomi ASEAN karena berkaitan dengan kompetisi antarnegara ASEAN yang terlalu cepat dan pendapatan bea cukai. Oleh sebab itu penetapan tarif dan penghapusan tarif perlu diidentifikasi lebih lanjut.⁵⁴ Sebagai contoh di Indonesia, Indonesia mencatatkan tarif impor pangan yang dilindungi pada WTO, seperti beras sebesar 9-160 persen, gula sebesar 40-95 persen, dan susu sebesar 40-120 persen. Namun dengan adanya kesepakatan perdagangan bebas tersebut, besaran tarif beras dan gula, dan susu menurun tajam. Jika dikaitkan dengan perdagangan di pasar dunia atau antara pasar ASEAN dengan pasar dunia maka diperlukan pertimbangan yang lebih matang ketika mengintegrasikan pasar domestik ke pasar global atau regional. Bagaimanapun distorsi terbesar perdagangan pangan dunia terletak pada pemberian subsidi yang berlebihan di negara-negara maju sehingga harganya lebih kompetitif.⁵⁵

Tarif bukan satu-satunya kebijakan perdagangan yang berkaitan dengan hambatan perdagangan, faktor lainnya berkaitan dengan komponen biaya perdagangan dan di dalamnya menyangkut halangan perdagangan nontarif. Dalam rangka menghapus hambatan nontarif seiring menuju integrasi ekonomi tahun 2015, masing-masing negara anggota ASEAN diminta untuk (1) meningkatkan transparansi dengan mematuhi *ASEAN Protocol on Notification Procedure*, (2) menetapkan *ASEAN Surveillance Mechanism* yang efektif, (3) komitmen untuk *standstill and roll-back*, (5) meningkatkan transparansi *nontariff measures* (NTMs), dan (5) konsisten dengan *international best practices*.

D. Kebijakan Perdagangan Internasional dan Ketahanan Pangan

Berbicara ketahanan pangan di antara negara-negara Asia Tenggara membutuhkan perhatian tidak hanya terkait dengan isu-isu makroekonomi (seperti pertumbuhan ekonomi, ketahanan pasar, dampak pembayaran hutang, dan infrastruktur fisik dan institusinya untuk mendistribusikan pangan), tetapi juga isu-isu yang berkaitan dengan tingkat produktivitas pertanian, diversifikasi, dan spesialisasi produksi serta anggaran pangan rumah tangga perdesaan di antara masyarakat miskin perdesaan. Masalah terbesar ketahanan pangan, seperti gizi buruk dan kemiskinan, banyak ditemukan di negara Laos,

⁵³ David J. Dennis and Zainal Aznam Yusof, *Op.Cit.*, h. 4-5.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 4-5.

⁵⁵ Khudori, "KTM IX WTO dan Pertanian Kita", Kompas, Rabu 4 Desember 2013.

Kamboja, dan Myanmar. Sedangkan Brunei Darussalam dan Singapura relatif tidak menghadapi masalah ketahanan pangan walaupun kedua bukan negara agraris. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang cepat, Malaysia, Filipina, dan Indonesia lebih dimungkinkan menderita dari masalah stabilitas makroekonomi secara umum daripada masalah ketahanan pangan secara khusus. Sedangkan Vietnam dan Thailand hingga saat ini menjadi eksportir pangan dan mulai bergeser ke arah diversifikasi perdagangan makanan dan produk-produk pertanian.

Tabel 6. Intervensi Pemerintah dalam Perdagangan Beras di Wilayah Asia Tenggara terkait dengan Ketahanan Pangan

Negara	Komoditas	Intervensi Kebijakan Pemerintah
Singapura	Beras	Impor beras dilakukan dengan 2 kategori, yaitu <i>stockpile</i> dan <i>ordinary license</i> . <i>Stockpile licenses</i> untuk menjaga stok beras dua kali jumlah yang diimpor, disimpan di gudang, dan biaya simpan ditanggung importir. Sedangkan <i>ordinary license</i> untuk beras yang nonstok.
Brunei Darussalam	Beras	Tidak ada halangan mengimpor beras.
Thailand	Beras, ubi kayu, durian, kelengkeng	Ekspor membutuhkan registrasi dari Departemen Pertanian.
Malaysia	Beras	Pemberian subsidi input, pengurangan tarif, dan mendukung harga minimum.
Indonesia	Beras	Harga pasar diintervensi melalui Bulog dengan menetapkan harga dasar untuk melindungi petani dan harga domestik beras untuk melindungi konsumen.
Filipina	Beras	Mengadakan dan mendistribusikan melalui sistem stok penyangga dan dukungan harga.
Kamboja	Beras	Mengelola bank benih padi dan menyediakan benih padi, mendistribusikan bahan bakar diesel, dan membeli padi petani.
Vietnam	Beras	Kuota ekspor beras dan pupuk dikontrol.
Myanmar	Beras	Mencapai surplus produksi padi.
Laos	Beras	Tidak ada kebijakan ketahanan pangan yang dijelaskan.

Sumber: *References to WTO Trade Policy Reviews* dalam International Trade Strategies Pty Ltd and the Center for Food and Agri-Business of the University of Asia and the Pacific⁵⁶

⁵⁶ International Trade Strategies Pty Ltd and the Center for Food and Agri-Business of the University of Asia and the Pacific, *Op.Cit.*, h. 56-57.

Pada Tabel 6 disajikan berbagai intervensi kebijakan perdagangan internasional yang terkait dengan ketahanan pangan di wilayah Asia Tenggara, baik di negara-negara ASEAN-6 maupun CLMV. Pemerintah masing-masing negara melakukan intervensi tersebut sebagai bentuk keberpihakannya terhadap pentingnya pangan dan ketahanan pangan. Di Singapura sejak tahun 2003, impor beras dilakukan di bawah lisensi yang dikeluarkan *Singapore Trade Development Board* (TDB) dengan 2 kategori, yaitu *stockpile* dan *ordinary license*. *Stockpile licenses* diterbitkan untuk menjaga stok beras dua kali jumlah yang diimpor, disimpan di gudang yang disetujui TDB, dan biaya simpan ditanggung importir. Tidak ada batasan jumlah lisensi yang diterbitkan dan jumlah beras yang diimpor per tahun. *Stockpile license* memungkinkan yang berwenang mengawasi impor sesuai jumlah stok yang dijaga. Sedangkan *ordinary license* diterbitkan untuk beras yang bukan untuk stok (misal *proboiled rice*, beras ketan, beras *basmati*, dan beras merah), yang tidak biasa dikonsumsi masyarakat dan berharga mahal. Sedangkan di Brunei Darussalam tidak ada halangan dalam mengimpor beras. Harga beras domestik cenderung membuat investasi asing pada pertanian, perikanan, dan pengolahan pangan kurang berkembang, di mana kepemilikan lokal mencapai 30 persen. Di Thailand, ekspor membutuhkan registrasi dari Departemen Pertanian. Berbeda dengan di Malaysia, pemerintah melindungi masyarakatnya dengan memberikan subsidi input, pengurangan tarif, dan mendukung harga minimum. Pemerintah menjamin harga minimum dan subsidi harga padi untuk petani. Di bawah skema jaminan harga minimum, *Bernas* membeli padi dari petani tidak lebih dari harga minimum tersebut. Selain itu di bawah program subsidi harga padi, pemerintah melakukan pembayaran tetap kepada petani untuk padi yang dijual kepada pemerintah. Hampir sama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, di mana harga pasar diintervensi melalui Bulog dengan menetapkan harga dasar untuk melindungi petani dan harga domestik beras untuk melindungi konsumen. Bulog memonopoli impor beras. Namun demikian menurut Bustanul Arifin⁵⁷ sebagai negara dengan *endowment* sektor pertanian yang besar, Indonesia tidak memiliki target politik swasembada pangan yang jelas, sehingga pangan di Indonesia banyak didominasi oleh barang-barang impor. Oleh sebab itu penentuan sikap perunding Indonesia di Forum Konferensi Tingkat Menteri kesembilan *World Trade Organization* (WTO) di Bali tanggal 3-6 Desember 2013 adalah penting, idealnya selain sebagai *trading country*, Indonesia diharapkan juga sebagai *production country*. Di Filipina, agen pemerintah bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan, stabilitas

⁵⁷ "Negara Wajib Intervensi Pangan", Suara Pembaharuan, Selasa 3 Desember 2013.

suplai beras, dan harga melalui *National Food Authority*. NFA mengadakan dan mendistribusikan melalui sistem stok penyangga dan dukungan harga. NFA membeli beras pada harga pembelian pemerintah selama musim panen dan mendistribusikannya selama musim paceklik. NFA memonopoli impor beras dan tahun 2003, NFA mengimplementasikan program petani sebagai impotir. Berbeda dengan di Kamboja, pemerintahnya melalui Kementerian Pertanian mengelola bank benih padi dan menyediakan benih padi untuk petani yang terkena dampak bencana alam. Sedangkan Kementerian Sumber Daya Air dan Meteorologi di tingkat daerah mendistribusikan bahan bakar diesel secara gratis sehingga pompa air dapat digunakan untuk irigasi saat kekeringan. Di sisi lain Kementerian Perdagangan membeli padi petani dan pada tahun 2001 lisensi beras mulai digulirkan. Di Vietnam, dari tahun 1997 hingga tahun 2000, kuota ekspor beras dan pupuk dikontrol. Pengontrolan ekspor beras untuk memastikan ketahanan pangan dan menghindari harga domestik yang meningkat. Sedangkan di Myanmar, kebijakan pemerintah untuk mencapai surplus produksi padi sehingga lebih banyak surplus beras dapat diekspor setelah konsumsi lokalnya terpenuhi. Pemerintah Laos tidak menerapkan kebijakan ketahanan pangan yang dijelaskan. Jadi secara umum Vietnam dan Myanmar melakukan kebijakan pengawasan terhadap ekspor beras melalui larangan ekspor beras untuk menjaga stok beras di dalam negeri. Sedangkan Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Kamboja, mengintervensi pasar padi dan beras di dalam negeri guna mencapai stabilisasi harga. Liberalisasi perdagangan beras ditunjukkan dengan mulai berkembangnya halangan perdagangan beras nontarif, seperti penetapan lisensi, yang dilakukan oleh Singapura, Thailand, dan Filipina.

Salah satu upaya bersama yang dilakukan antarnegara-negara ASEAN adalah dengan membentuk *rice reserve* (*ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve* atau APTERR) sehingga stok beras tetap terjaga dan tidak menyebabkan kepanikan di dalam masyarakat. Lembaga ini didirikan oleh Kementerian Pertanian dan Kehutanan dari negara Cina, Jepang, dan Korea Selatan untuk mengamankan ketahanan pangan dalam keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana, melalui penyediaan bantuan pangan dan program peningkatan gizi kepada masyarakat miskin.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Beras menjadi bahan pangan pokok yang esensial bagi penduduk di Asia Tenggara. Oleh sebab itu impor beras masih dilakukan oleh negara-negara

Asia Tenggara untuk menjaga stok pangannya meskipun statusnya sebagai negara pengekspor beras. Laju pertumbuhan impor beras negara-negara Asia Tenggara mencapai 14,08 persen dan dengan kontribusi konsumsi beras mencapai lebih dari 22 persen terhadap konsumsi beras dunia. Sedangkan laju pertumbuhan ekspor beras mencapai 2,21 persen dan dengan dukungan kontribusi produksi padi lebih dari 30 persen terhadap produksi padi dunia. Pemerintah memiliki kepentingan terhadap penguatan ketahanan pangan di masing-masing negara dengan mengintervensi pasar padi dan beras melalui kebijakan perdagangan internasional, baik berupa larangan ekspor maupun lisensi, dan kebijakan stabilisasi harga beras domestik.

Integrasi ekonomi melalui AEC menjadi momentum untuk mewujudkan ketahanan pangan pada *level* regional. Ketika pasar beras lebih terbuka (*no trade barrier*) antarnegara-negara Asia Tenggara maka masing-masing negara akan meningkatkan spesialisasi perdagangan beras berdasarkan dukungan sumber daya alamnya dan *supply chain* dunia. Dukungan politik pangan yang jelas dan *research and development* dan *research on global issue for development* pangan menjadi bagian yang esensial. Kebutuhan beras di wilayah Asia Tenggara dapat dipenuhi melalui akses aliran perdagangan beras dari negara-negara yang surplus, seperti di wilayah semenanjung negara-negara Asia Tenggara, ke negara-negara dengan dukungan sumber daya alam yang lebih terbatas, seperti wilayah kepulauan di negara-negara Asia Tenggara.

B. Saran

Ketika liberalisasi perdagangan beras diberlakukan maka hambatannya akan bergeser ke arah perdagangan nontarif, seperti persyaratan lisensi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stok beras di masing-masing negara. Oleh sebab itu implementasi lisensi beras tersebut sebaiknya diikuti dengan pelatihan dari negara yang menetapkan lisensi dan sekaligus membentuk institusi standarisasi beras di *level* regional mengingat adanya perbedaan dalam teknik budidaya hingga pasca panen.

Swasembada beras dapat menjadi kekuatan negara untuk menjaga tingkat ketahanan pangan sehingga tidak rentan terhadap volatilitas harga beras di dunia. Oleh sebab itu upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas padi di masing-masing negara harus terus dikembangkan mengingat laju penambahan lahan tanam padi yang melambat. Misalnya dengan introduksi jenis padi varietas unggul hingga teknik budidaya. Selain itu, perubahan preferensi konsumen terhadap jenis beras tertentu dan budidaya padi yang lebih ramah lingkungan juga perlu menjadi landasan dalam berproduksi (*demand driven*).

Di samping itu hal lain yang penting adalah (1) mendorong investasi untuk meningkatkan infrastruktur dan logistik perberasan mulai dari subsistem hulu hingga hilir sehingga tingkat produktivitas padi dan industri hilir padi dapat berkembang, khususnya di negara-negara CLMV dan (2) akselerasi program diversifikasi pangan nonberas perlu ditingkatkan oleh masing-masing negara sehingga volatilitas harga beras tidak banyak mempengaruhi konsumsi dan produksi pangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Calpe, Concepción. *Rice International Commodity Profile*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2006.
- Dunn, Robert M. and John H. Mutti. *International Economics*, Sixth Edition. New York: Routledge, 2004.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Safeguarding Food Security in Volatile Global Markets*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011.
- Hermawan, Iwan. *Peran Sektor Pertanian untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia dalam Turbulensi Ekonomi*, Edisi Bunga Rampai “Agenda Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Program Legislasi Bidang Ekonomi”. Jakarta: P3DI, 2011.
- International Rice Research Institute. *Rice in the Global Economy Strategic Research and Policy Issues for Food Security*. Metro Manila: International Rice Research Institute, 2010.
- Kementerian Perdagangan. *Menuju ASEAN Economy Community 2015, Bagian Kerja Sama Perdagangan Internasional*. Jakarta: Kementerian Perdagangan, tidak ada tahun.
- Kementerian Pertanian. *Road Map Diversifikasi Pangan 2011-2015*, Edisi 2. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan-Kementerian Pertanian, 2012.
- OECD and ASEAN Secretary. *Southeast Asian Economic Outlook 2013, With Perspectives On China And India, Narrowing Development Gaps*. Paris and Jakarta: OECD and ASEAN Secretary, 2003.

Jurnal

- Ismail, Normaz Wana, P. Smith, and M. Kugler. “The Effect of ASEAN Economic Integration on Foreign Direct Investment”. *Journal of Economic Integration*, Vol. 24, No. 3 (September 2009), h. 385-407.
- George Kent. “Africa’s Food Security Under Globalization”. *African Journal of Food and Nutritional Sciences*, Vol 2, No. 1, March 2002, h. 22-29.

Yanikkaya, Halit. "Trade Openness and Economic Growth: A Cross-Country Empirical Investigation". *Journal of Development Economics*, 72, 2003, h. 57-89.

Makalah

Nielsen, Chantal Pohl. "Vietnam's Rice Policy: Recent Reforms and Future Opportunities", Danish Research Institute of Food Economics, Vietnam's Rice Policy, no year.

Food and Agriculture Organization. "World Food Summit 13-17 November 1996", Rome-World Food Summit Plan of Action, FAO Corporate Document Repository, (<http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.HTM>, diakses 1 Oktober 2013).

International Trade Strategies Pty Ltd and the Center for Food and Agri-Business of the University of Asia and the Pacific. "A Background Paper for the Strategic Plan of Action on ASEAN Cooperation in Food and Agriculture (2005 - 2010)", REPSF Project No. 03/004, Final Report, 2004.

Morrissey, Oliver. "Costs, Benefits and Risks from Trade: Theory and Practice for Food Security". Presented at the FAO Expert Consultation on Trade and Food Security: Conceptualizing the Linkages. Rome 11-12 July 2002.

Shiferaw, Bekele, Jonathan Hellin, Vijesh Krishna, Olaf Erenstein, and Sika Gbегbelegbe. "Changing Demand Patterns and Maize Value Chains in Asia", 11th Asian Maize Conference November 7-11 2-11-Nanning, China-International Maize and Wheat Improvement Center-CIMMYT, (<http://www.slideshare.net/CIMMYT/s71-changing-demand-patterns-and-maize-value-chains-in-asia>, diakses 4 Oktober 2013).

Working Paper

Brooks, Douglas, Benno Ferrarini, and Eugenia Go. "Bilateral Trade and Food Security". ADB Economics Working Paper Series No. 367, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2013.

Chirathivat, Suthiphand and Piti Srisangnam. "The 2030 Architecture of Association of Southeast Asian Nations Free Trade Agreements". ADBI Working Paper Series No. 419, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2013.

Clarete, Ramon L. "Enhancing ASEAN's Resiliency to Extreme Rice Price Volatility". ADB Sustainable Development Working Paper Series No. 23, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2012.

- Headey, Derek D. "Rethinking the Global Food Crisis, The Role of Trade Shocks". IFPRI Discussion Paper 00958, Washington DC., International Food Policy Research Institute, 2010.
- Kawai, Masahiro and Ganeshan Wignaraja. "Regionalism as an Engine of Multilateralism: A Case for a Single East Asian FTA". Working Paper Series on Regional Economic Integration No. 14, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2008.
- Timmer, C. Peter. "Causes of High Food Prices". ADB Economics Working Paper Series No. 128, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2008.
- Wailes, Eric J. and Eddie C. Chavez. "ASEAN and Global Rice Situation and Outlook". ADB Sustainable Development Working Paper Series No. 22, Asian Development Bank, Mandaluyong City, 2012.

Makalah

- Food and Agriculture Organization. "World Food Summit 13-17 November 1996", Rome-World Food Summit Plan of Action, FAO Corporate Document Repository, (<http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.HTM>, diakses 1 Oktober 2013).
- International Trade Strategies Pty Ltd and the Center for Food and Agri-Business of the University of Asia and the Pacific. "A Background Paper for the Strategic Plan of Action on ASEAN Cooperation in Food and Agriculture (2005 - 2010)", REPSF Project No. 03/004, Final Report, 2004.
- Morrissey, Oliver. "Costs, Benefits and Risks from Trade: Theory and Practice for Food Security". Presented at the FAO Expert Consultation on Trade and Food Security: Conceptualizing the Linkages. Rome 11-12 July 2002.
- Nielsen, Chantal Pohl. "Vietnam's Rice Policy: Recent Reforms and Future Opportunities", Danish Research Institute of Food Economics, Vietnam's Rice Policy, no year.
- Shiferaw, Bekele, Jonathan Hellin, Vijesh Krishna, Olaf Erenstein, and Sika Gbegbelegbe. "Changing Demand Patterns and Maize Value Chains in Asia", 11th Asian Maize Conference November 7-11 2-11-Nanning, China-International Maize and Wheat Improvement Center-CIMMYT, (<http://www.slideshare.net/CIMMYT/s71-changing-demand-patterns-and-maize-value-chains-in-asia>, diakses 4 Oktober 2013).

Laporan

- Baldwin, Katherine, Nathan Childs, John Dyck, and Jim Hansen. "Southeast Asia's Rice Surplus", A Report from the Economic Research Service. United States Department of Agriculture, 2012.
- Childs, Nathan and James Kiawu. "Factors Behind the Rise in Global Rice Prices in 2008". A Report from the Economic Research Service, RCS-09D-01, United States Department of Agriculture., May 2009.
- Dennis, David J. and Zainal Aznam Yusof. "Developing Indicators of ASEAN Integration-A Preliminary Survey for A Roadmap". REPSE Project 02/001, Final Report, ASEAN Secretary and Australian Government, 2003.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. "Rice Market Monitor". Trade and Markets Division Food and Agriculture Organization of the United Nations, Volume XVI - Issue No. 2, Rome, 2013.
- Kementerian Pertanian. "Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2011", (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2012).
- Young, Kenneth B., Eric J. Wailes, Gail L. Cramer, and Nguyen Tri Khiem. "Vietnam's Rice Economy: Developments and Prospects". Research Report 968, Arkansas Agricultural Experiment Station, Arkansas, 2002.

Surat Kabar

- Khudori. "KTM IX WTO dan Pertanian Kita". Kompas, Rabu 4 Desember 2013.
- "Negara Wajib Intervensi Pangan". Suara Pembaharuan, Selasa 3 Desember 2013.

Artikel dalam Internet

- Agustia, Ririn. "Indonesia Catat Rekor Produksi Padi", (<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/01/090477112/Indonesia-Catat-Rekor-Produksi-Padi>, diakses 24 September 2013).
- (http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=480&Itemid=100210&lang=en, diakses 16 Agustus 2013).
- "Impor Beras untuk Ketahanan Pangan", (<http://www.investor.co.id/agribusiness/imp-or-beras-untuk-ketahanan-pangan/45538>, diakses 21 Agustus 2013).

- Jefriando, Maikel. "Indonesia Masih Getol Impor Beras dari 5 Negara Ini", (<http://finance.detik.com/read/2013/08/20/082447/2334699/4/indonesia-masih-getol-impor-beras-dari-5-negara-ini>, diakses 21 Agustus 2013).
- "Konsumsi Beras Nasional Tertinggi Se-Asia, Diversifikasi Pangan harus Digenjot", (<http://www.neraca.co.id/harian/article/26605/Konsumsi.Beras.Nasional.Tertinggi.SeAsia>, diakses 23 Agustus 2013).
- Mohanty, Samarendu. "Trends in Global Rice Consumption", (http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12448:trends-in-global-rice-consumption&lang=en, diakses 16 Agustus 2013) dan data FAO tahun 2013.
- Puslitbang Tanaman Pangan, "Peningkatan Produksi Padi Menuju 2020", (http://www.puslittan.bogor.net/index.php?bawaan=download/download_detail&id=35, diakses 24 September 2013).
- "Rice Basics", (http://www.irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=9081 &lang=en, diakses 27 September 2013).
- Stevens, Christopher, Romilly Greenhill, Jane Kennan, and Stephen Devereux. "The WTO Agreement on Agriculture and Food Security", (http://ieham.org/html/docs/The_WTO_agreement_on_Agriculture_and_Food_Security.pdf, diakses 2 Oktober 2013).
- "Supporting the ASEAN Economic Community (AEC)-Agriculture", (<http://www.aadcp2.org/home/stream.php?id=6>, diakses 17 Juli 2013).
- Yap, Normalyn. "Why Does the Philippines Import Rice: A Solution to the Rice Shortage", (Taichung, National Chung Hsing University, tidak ada tahun), http://www.nodai.ac.jp/cip/iss/english/9th_iss/fullpaper/1-1-5nchu-tibao.pdf, diakses 27 September 2013).

